

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI
BELANJA DAERAH**

**Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 - 2010**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :
Arsensius Agripa
NIM: 082114098**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI
BELANJA DAERAH**

**Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 - 2010**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



**Oleh :
Arsensius Agripa
NIM: 082114098**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA**

2012

Skripsi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI
BELANJA DAERAH**

Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun 2007-2010

Oleh :

Arsenius Agripa

NIM: 082114098

Telah Disetujui oleh :

Pembimbing



Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA

Tanggal : 7 Agustus 2012

Skripsi

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN
DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI
BELANJA DAERAH**

**Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007-2010**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

Arsenius Agripa

NIM: 082114098

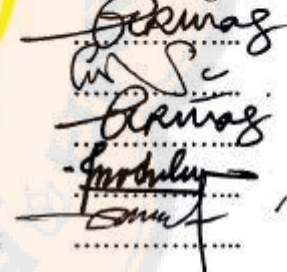
Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 29 Agustus 2012
dan dinyatakan memenuhi syarat

Susunan Dewan Penguji

Nama Lengkap

Ketua : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Sekretaris : Lisia Apriani, S.E., M.Si., Akt., QIA
Anggota : Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA
Anggota : Dr. Titus Odong Kusumajati, M.A.
Anggota : Drs. Yusef Widya Karsana, M.Si., Akt., QIA

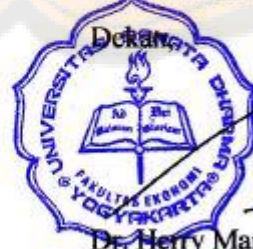
Tanda Tangan



Yogyakarta, 31 Agustus 2012

Fakultas Ekonomi

Universitas Sanata Dharma



Dr. Herry Maridjo M.Si

Motto dan Persembahan

“Percayalah pada diri sendiri dan jangan pernah menjadi diri orang lain, karena diri sendirilah yang akan menentukan arah hidup di masa depan”
(Arsensius Agripa)

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

Tuhan Yesus Kristus dan Bunda Maria

Mamaku tercinta yang ada di surga

Papa dan Kakakku tercinta

Kekasihku dan sahabat - sahabatku

Terimakasih banyak atas segala doa, dukungan dan kasih sayang selama proses penyusunan skripsiku.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



UNIVERSITAS SANATA DHARMA
FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI – PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul : **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2010)”** dan dimajukan untuk diuji pada tanggal 29 Agustus 2012 adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain yang saya aku seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang diberikan oleh universitas batal saya terima.

Yogyakarta, 31 Agustus 2012

Yang membuat pernyataan,

(Arsensius Agripa)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN
AKADEMIS**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya Universitas Sanata Dharma:

Nama : Arsensius Agripa

Nomor Induk Mahasiswa : 082114098

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Perpustakaan Universitas Sanata Dharma karya ilmiah yang berjudul: **PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH** (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2010) beserta perangkat yang diperlukan (bila ada).

Dengan demikian saya memberikan kepada Perpustakaan Sanata Dharma hak untuk menyimpan, mengalihkan dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2012

Yang menyatakan,



Arsensius Agripa

KATA PENGANTAR

Puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Romo Rektor Universitas Sanata Dharma yang telah memberikan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan kepribadian kepada penulis.
2. Dr. Herry Maridjo, M. Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
3. Drs. YP. Supardiyono, M. Si., Akt., QIA selaku Kepala Program Studi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
4. Firma Sulistiyowati, S.E., M.Si., QIA selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membantu serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bimbingan dan bantuan selama belajar di Universitas Sanata Dharma.
6. Bapak dan Ibu staff Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Papa dan Kakakku tercinta, yang selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi dalam mengerjakan skripsi.
8. Pacarku yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Buat teman-teman Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma.
10. Buat teman-teman alumni SMA Sedes Sapientiae.

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

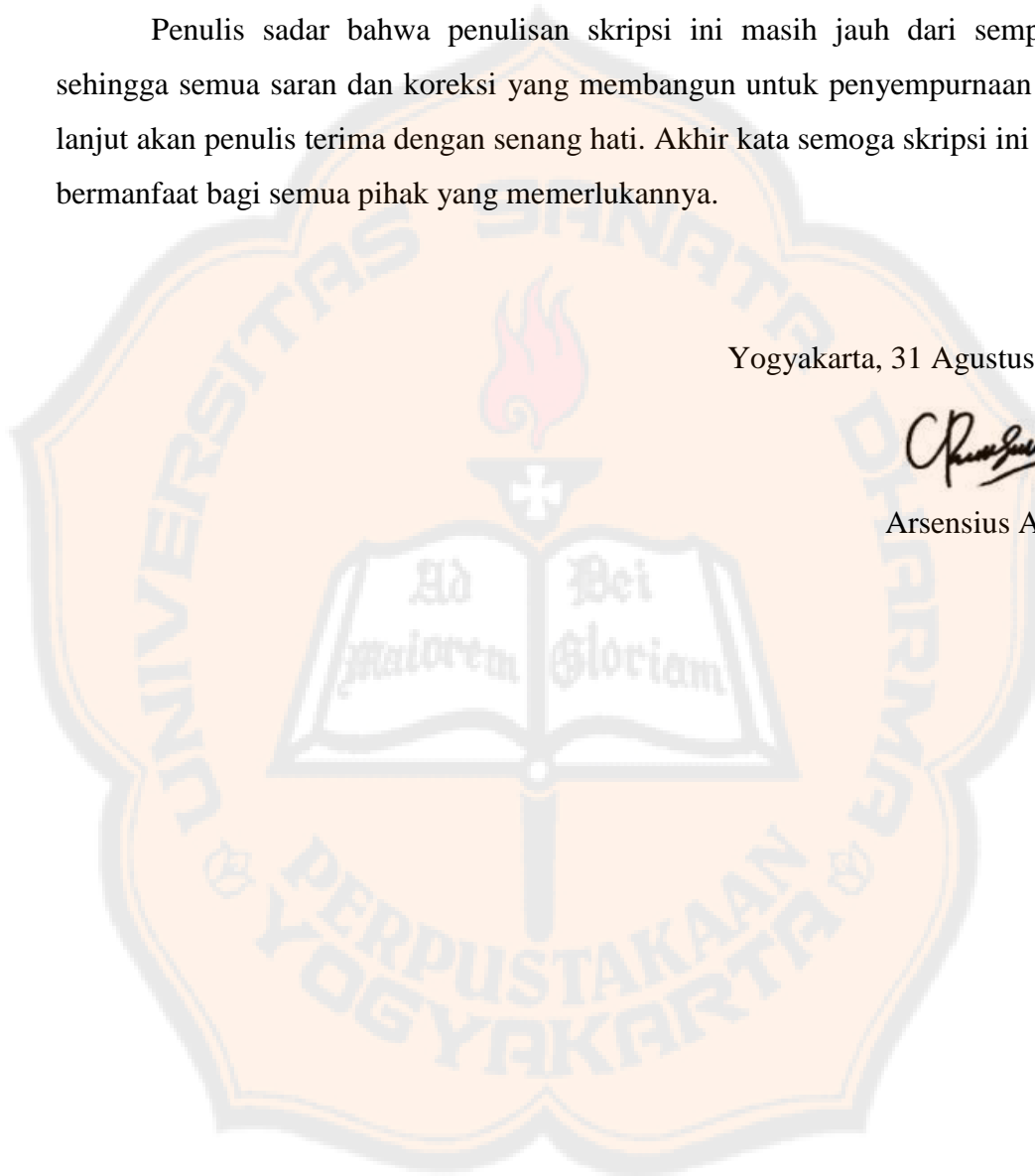
11. Keluarga besar Kos-kosan Lampar 19E yang selalu memberikan dukungan dan semangat selama tinggal dikos-kosan terimakasih atas canda tawanya.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis sadar bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga semua saran dan koreksi yang membangun untuk penyempurnaan lebih lanjut akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2012



Arsensius Agripa

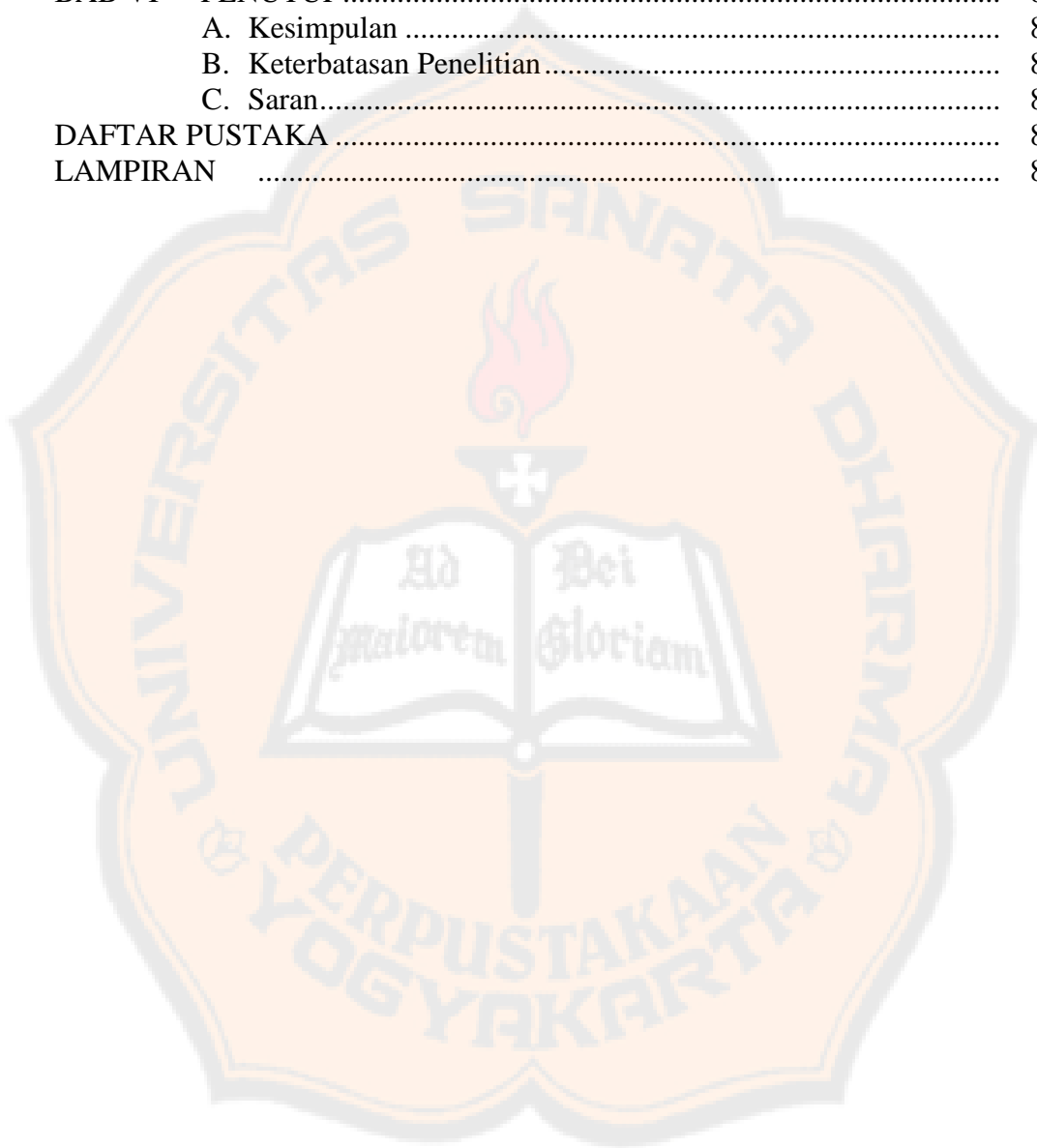


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
HALAMAN DAFTAR TABEL	xi
HALAMAN DAFTAR GAMBAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	8
A. Otonomi Daerah	8
B. Anggaran Daerah	8
C. Pendapatan Asli Daerah	11
D. Dana Alokasi Umum.....	14
E. Belanja Daerah	17
F. Review Penelitian Terdahulu	21
G. Hipotesis penelitian.....	23
BAB III METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis Penelitian.....	27
B. Tempat dan Waktu Penelitian	27
C. Subjek dan Objek Penelitian	27
D. Desain Penelitian.....	28
E. Data yang dicari	29
F. Teknik Pengumpulan Data.....	30
G. Variabel Penelitian dan Denifisi Operasional.....	30
H. Teknik Analisis Data.....	34
BAB IV GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DIY	44
A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta	44
B. Keadaan Geografis DIY	48
C. Pemerintahan DIY	49
D. Keadaan Penduduk	51
E. Keadaan Sosial	52
F. Perekonomian	54

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

BAB V	ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....	55
	A. Analisis Deskripsi.....	55
	B. Uji Asumsi Klasik	58
	C. Hasil Analisis Data	68
	D. Pembahasan Hipotesis	77
BAB VI	PENUTUP.....	82
	A. Kesimpulan	82
	B. Keterbatasan Penelitian.....	84
	C. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1	Tabel Jumlah Penduduk 51
Tabel 4.2	Tabel Sumber Perekonomian DIY 54
Tabel 5.1	Tabel Statistik Deskriptif 55
Tabel 5.2	Tabel One sample Kolmogorov – Smirnov test ABL 60
Tabel 5.3	Tabel Uji Multikolinearitas ABL 61
Tabel 5.4	Tabel Runs Test ABL 62
Tabel 5.5	Tabel One Sample Kolmogorov- Smirnov test ABTL 64
Tabel 5.6	Tabel Uji Multikolinearitas ABTL 65
Tabel 5.7	Tabel Run Test ABTL 67
Tabel 5.8	Tabel Regresi Berganda ABL 68
Tabel 5.9	Tabel Uji F ANNOVA ABL 69
Tabel 5.10	Tabel Uji T Coefficients ABL 70
Tabel 5.11	Tabel Koefisien Determinasi ABL 71
Tabel 5.12	Tabel Regresi Berganda ABTL 72
Tabel 5.13	Tabel Uji F ANNOVA ABTL 73
Tabel 5.14	Tabel Uji T Coefficients ABTL 74
Tabel 5.15	Tabel Koefisien Determinasi ABTL 76
Tabel 5.16	Tabel Ringkasan Uji Hipotesis 77

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1	Gambar Desain Penelitian..... 28
Gambar 2	Gambar Probability Plot ABL..... 59
Gambar 3	Gambar Scatterplot ABL..... 62
Gambar 4	Gambar Probability Plot ABTL 63
Gambar 5	Gambar Scatterplot ABTL 66



ABSTRAK

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA
ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH
Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2007 - 2010**

Arsensius Agripa
NIM : 082114098
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
2012

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2007 - 2010.

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan dokumentasi dan studi pustaka. Data yang didapat bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun 2007 – 2010 pada empat Kabupaten dan satu Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat dari hasil perhitungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung serta alokasi belanja tidak langsung. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) maka semakin tinggi juga alokasi untuk belanja langsung serta alokasi belanja tidak langsung.

ABSTRACT

**The Influence of Regional Original Revenue (PAD) and General Allocation Fund (DAU) toward Provincial Budget
(A Case Study at Regency/Municipality Government of Special Region of Yogyakarta Year 2007-2010)**

Arsensius Agripa
Student Number : 082114098
Sanata Dharma University
Yogyakarta
2012

This research aims to investigate and analyze whether Regional Original Revenue and General Allocation Fund had positive influence toward Regional Expenditure in the Regency/Municipality Government of Special Region of Yogyakarta from 2007 to 2010.

This research was a case study. The data were collected by conducting documentation and library research. The source of data was from the Realization of regional Budget Report from 2007 to 2010 in four regencies and one municipality in Special Region of Yogyakarta. The technique of data analysis applied for this research was multiple linear regression.

The result showed that Regional Original Revenue and General Allocation Fund had significant influence to Regional Expenditure Allocation. If it was seen from the calculation result, Regional Original Revenue and General Allocation Fund positively influenced direct expenditure allocation and indirect expenditure allocation. The higher the Regional original Revenue and General Allocation Fund, the higher was the allocation for direct and indirect expenditure.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era reformasi di Indonesia pada saat ini membuat perubahan yang terjadi di sistem pemerintahan. Salah satu perubahan yang terjadi yaitu diberlakukannya otonomi daerah di setiap propinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Diberlakukannya otonomi daerah dikarenakan tidak meratanya pembangunan yang berjalan selama ini sehingga menyebabkan ketimpangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Selain itu adanya campur tangan pemerintah pusat di masa lalu menyebabkan daerah mengalami kurangnya kreativitas dan terhambatnya pengembangan potensi yang dimiliki daerahnya sehingga proses pembangunan di daerah tidak berjalan lancar.

Pelaksanaan kebijakan pemerintah Indonesia tentang otonomi daerah dimulai secara efektif pada tanggal 1 Januari 2001, hal ini merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi yang sesungguhnya. Desentralisasi sendiri mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah dan antar daerah (sidik et al, 2002 dalam Maemunah, 2006).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, daerah diberi kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri dengan sesedikit mungkin campur tangan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Selain dari dana perimbangan tersebut, Pemerintah daerah juga mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Lain-lain Pendapatan Daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada setiap daerah berbeda-beda. Banyak daerah yang memiliki PAD jauh lebih besar dibanding daerah lainnya, selain itu banyak daerah yang memiliki PAD lebih rendah sehingga terjadi kesenjangan sosial. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 salah

satu dana perimbangan dari Pemerintah Pusat adalah Dana Alokasi Umum (DAU) yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah. Daerah yang mempunyai potensi pajak dan sumber daya alam yang besar hanya terbatas pada sejumlah daerah tertentu saja. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Peranan Dana Alokasi Umum terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pemerataan berdasarkan pertimbangan atas potensi fiskal dan kebutuhan nyata dari masing-masing daerah. Dalam hal ini DAU merupakan bagian dari Dana Perimbangan APBD yang memiliki peranan sangat dominan dibandingkan dengan Dana Perimbangan lainnya seperti Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan

keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai daerah otonom dibentuk dengan Undang-undang No. 3 tahun 1950, sehingga wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat diatur sendiri oleh pemerintah daerah. Sehubungan dengan adanya kebijakan otonomi daerah, hal penting yang harus diperhatikan adalah ketersediaan dana untuk membiayai tugas dan kewajiban daerah. Peranan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum diharapkan mampu dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dan memperlancar program-program pemerintah untuk kesejahteraan dan pelayanan publik.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap: "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Alokasi Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2010".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung ?

2. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya dibatasi dengan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja Langsung dan Alokasi Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007-2010.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar :

1. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2010.
2. Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2010.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah :

1. Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta

Bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, penelitian ini akan memberikan manfaat untuk pemerintah dalam merealisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja langsung dan Belanja tidak langsung Pemerintah, sehingga dapat

digunakan sebagai referensi untuk mendukung pembuatan keputusan atau kebijakan.

2. Bagi Universitas Sanata Dharma

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta referensi koleksi bagi mahasiswa Universitas Sanata Dharma di masa mendatang.

3. Bagi Peneliti lainnya

Bagi peneliti lainnya yang tertarik pada penelitian yang sama ini dapat menjadi referensi dan data tambahan.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan membahas hal-hal yang mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini akan membahas tentang hal-hal yang mengenai teori yang melandasi penelitian ini meliputi: otonomi daerah, anggaran daerah, pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), belanja daerah, review penelitian terdahulu, dan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini akan membahas hal-hal yang mengenai jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, desain penelitian, sumber data, variabel penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV: Gambaran Umum Objek Penelitian

Dalam bab ini akan membahas hal-hal yang mengenai gambaran umum Daerah Istimewa Yogyakarta seperti sejarah singkat, keadaan geografis, keadaan penduduk, sosial, pemerintahan, perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB V : Analisa Data dan Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas hal-hal yang mengenai analisis data serta pembahasan meliputi: analisis deskriptif, uji asumsi klasik, hasil analisis regresi berganda, hasil pengujian hipotesis dan pembahasan hipotesis.

BAB VI : Penutup

Dalam bab ini akan membahas dari hasil kesimpulan, Keterbatasan Penelitian dan saran untuk penelitian berikutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Otonomi Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah pada hakikatnya berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan, kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat (Halim, 2001: 22).

Dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tujuan otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta peningkatan potensi daerah secara optimal, terpadu, nyata, dinamis, dan bertanggungjawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Halim, 2001: 23).

B. Anggaran Daerah

Menurut Mardiasmo (2002 : 61), menyatakan bahwa anggaran merupakan “pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial”, sedangkan

penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Anggaran daerah merupakan salah satu alat yang memegang peranan penting dalam meningkatkan pelayanan publik dan didalamnya tercermin kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan potensi dan sumber-sumber kekayaan daerah. APBN merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Untuk melaksanakan hak dan kewajibannya serta melaksanakan tugas yang dibebankan oleh rakyat, pemerintah harus mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut yang disusun secara matang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan tugas Negara. Oleh karena itu rencana-rencana pemerintah untuk melaksanakan keuangan Negara perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.

Penyusunan APBD yang perlu menjadi acuan Badan Perencanaan Keuangan dan Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, transparansi anggaran merupakan hal yang penting, APBD merupakan salah satu sarana evaluasi kinerja pemerintah yang memberikan informasi mengenai tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek.

2. Disiplin anggaran

Anggaran yang disusun perlu diklarifikasikan dengan jelas agar tidak terjadi tumpang tindih yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Oleh karena itu penyusunan anggaran harus bersifat efisien, tepat guna, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Keadilan anggaran

Pembiayaan pemerintah daerah dilakukan melalui mekanisme pajak dan retribusi yang dikenakan kepada masyarakat. Oleh karena itu, penggunaannya harus dialokasikan secara adil dan proposional agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

4. Efisiensi dan efektifitas anggaran

Dana yang dihimpun dan digunakan untuk pembangunan harus dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat. Oleh karena itu, perencanaan perlu ditetapkan secara jelas tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang diperoleh masyarakat dengan melakukan efisiensi dan efektifitas.

5. Disusun dengan pendekatan kinerja

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja dari perencanaan alokasi biaya atau input yang telah ditetapkan. Hasil kerjanya harus sepadan atau lebih besar dari biaya atau input yang telah ditetapkan. Selain itu harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja setiap organisasi kerja yang terkait.

C. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk digunakan sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari Pemerintah Pusat.

Menurut Bawono (2012: 13), "Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan wujud representasi kemampuan daerah dalam menggali potensi yang dimiliki". Semakin besar PAD yang dihasilkan, semakin mandiri daerah tersebut secara finansial dalam membiayai pemerintahannya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tingkat PAD juga merupakan korelasi tolok ukur keberhasilan dari otonomi daerah. Namun demikian, kewenangan daerah dalam menggali PAD diharapkan tidak membuat pemerintah daerah menjadi profit oriented (lebih berorientasi pada keuntungan semata) dan meninggalkan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Implementasi PAD harus berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PAD terdiri dari:

1. Pajak daerah.
2. Retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

1. Pajak daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis-jenis pajak daerah tingkat provinsi :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Jenis-jenis pajak daerah kabupaten/kota :

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir.

2. Retribusi daerah

Menurut Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian

izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Jenis-jenis retribusi daerah terdiri :

- a. Retribusi Jasa Umum.
 - b. Retribusi Jasa Usaha.
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Perusahaan daerah adalah semua perusahaan yang didirikan seluruhnya atau sebagian dengan modal daerah. Tujuannya adalah dalam rangka menciptakan lapangan kerja atau mendorong perekonomian daerah dan merupakan cara yang efisien dalam melayani masyarakat dan untuk menghasilkan penerimaan daerah. Bagian keuntungan usaha daerah atau laba usaha daerah adalah keuntungan yang menjadi hak pemerintah daerah dari usaha yang dilakukannya.

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jenis pendapatan yang dirinci menurut objek pendapatan mencakup :

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.

- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN.
 - c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Lain-lain PAD yang sah adalah penerimaan daerah di luar penerimaan yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, dan bagian laba usaha yang telah diuraikan di atas. Rekening ini disediakan untuk mengakuntansikan penerimaan daerah selain yang disebut di atas. Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi:

- a. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan.
- b. Jasa Giro .
- c. Pendapatan bunga.
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah.

D. Dana Alokasi Umum

Menurut Bawono (2012: 17), Dana Alokasi Umum adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi”.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa DAU memiliki tujuan pemerataan. Dengan kata lain, DAU merupakan semacam subsidi silang antar pemerintah daerah. Hal tersebut untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Untuk daerah yang dalam proses pengembangan atau hasil pemekaran baru, kebutuhan dan potensinya akan bergantung pada keberadaan DAU.

Daerah yang dalam tahap pengembangan umumnya memiliki PAD yang lebih kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan pendanaan untuk melaksanakan fungsi layanan dasar. Mempertimbangkan kondisi tersebut, pemerintah pusat dalam mengalokasikan DAU memperhitungkan kebutuhan fiskal daerah dengan potensi daerah yang dimiliki.

Menurut Halim (2004) ketimpangan ekonomi antara satu Provinsi dengan Provinsi lain tidak dapat dihindari dengan adanya desentralisasi. Hal ini disebabkan oleh minimnya sumber pajak dan Sumber Daya Alam yang kurang dapat digali oleh Pemerintah Daerah. Untuk menanggulangi ketimpangan tersebut, Pemerintah Pusat berinisiatif untuk memberikan subsidi berupa Dana Alokasi Umum kepada daerah. Bagi daerah yang tingkat kemiskinannya lebih tinggi, akan diberikan Dana Alokasi Umum lebih besar dibanding daerah yang kaya dan begitu juga sebaliknya. Selain itu untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penugasaan pajak antara pusat dan daerah telah diatasi dengan adanya kebijakan bagi hasil dan Dana Alokasi Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Dana Alokasi Umum akan memberikan kepastian bagi daerah dalam

memperoleh sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab masing-masing daerah.

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan. Adapun cara menghitung DAU menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Dana Alokasi umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari penerimaan dalam negeri yang ditetapkan dalam APBN.
- b. Dana Alokasi umum (DAU) untuk daerah propinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% dan 90% dari dana alokasi umum sebagaimana ditetapkan diatas.
- c. Dana Alokasi umum (DAU) untuk suatu daerah kabupaten/kota tertentu ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah dana alokasi umum untuk daerah/kabupaten yang ditetapkan APBN dengan porsi daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- d. Porsi daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud di atas merupakan proporsi bobot daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah daerah, Pemerintah pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan Sumber Daya Alam. Disamping Dana Perimbangan

tersebut, Pemerintah Daerah memiliki sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan lain-lain pendapatan yang sah.

Kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dana transfer dari Pemerintah Pusat diharapkan digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, bahwa kebutuhan DAU oleh suatu daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan atas kebutuhan daerah dengan potensi daerah. Dana Alokasi Umum digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah yang ada.

E. Belanja Daerah

Menurut Halim (2012: 60), Belanja daerah adalah “semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode Anggaran”. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda.

Menurut Renyowijoyo (2008: 244), “Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat”. Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dimaksud diwujudkan dalam bentuk pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas

pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah harus mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Proses penyusunan APBD secara keseluruhan berada di tangan sekretaris daerah yang bertanggung jawab mengkoordinasikan seluruh kegiatan penyusunan APBD. Sedangkan proses penyusunan belanja rutin disusun oleh bagian keuangan Pemerintah daerah, proses penyusunan penerimaan dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah dan proses penyusunan belanja pembangunan disusun oleh Bappeda (Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah).

Menurut Mahsun (2011: 97), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari dua komponen utama yaitu: belanja langsung dan belanja tidak langsung. Jenis belanja langsung yaitu merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung yaitu belanja pegawai (upah dan honorarium), belanja barang & jasa dan belanja modal. Jenis belanja tidak langsung yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja tidak langsung seperti belanja pegawai untuk membayar gaji dan tunjangan PNS, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Jenis – jenis belanja menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 50 yaitu :

1. Belanja tidak langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara tidak langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung ini terdiri dari :
 - a. Belanja pegawai yaitu merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - b. Belanja bunga yaitu merupakan anggaran pembayaran bunga hutang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.
 - c. Belanja subsidi yaitu merupakan anggaran bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 - d. Belanja hibah yaitu merupakan anggaran pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat dan perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 - e. Bantuan sosial yaitu merupakan anggaran pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- f. Belanja bagi hasil yaitu merupakan anggaran yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota, atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - g. Bantuan keuangan yaitu merupakan anggaran keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan.
 - h. Belanja tidak terduga yaitu merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana social yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
2. Belanja langsung adalah merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja langsung ini terdiri dari :
- a. Belanja pegawai yaitu merupakan pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
 - b. Belanja barang dan jasa yaitu merupakan pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.

- c. Belanja modal yaitu merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan, mesin, gedung, bangunan dan jalan, irigasi, jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan dan pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

F. Review Penelitian Terdahulu

Rahmawati (2010) melakukan penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja Daerah Di Jawa Tengah”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja daerah. Jika dilihat lebih lanjut, tingkat ketergantungan alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung lebih dominan terhadap PAD dari pada DAU.

Puspita Sari dan Yahya (2009) menguji “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau”. Ada tiga simpulan yang merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu: Pertama, DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung. Kedua, PAD secara parsial tidak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap belanja langsung secara parsial. Ketiga, DAU dan

PAD secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung.

Prakosa (2004) mengenai “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Prediksi Belanja Daerah wilayah propinsi Jateng dan DIY”. Penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya belanja daerah dipengaruhi jumlah dana alokasi umum yang diterima dari pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja daerah. Dalam model prediksi belanja daerah, daya prediksi dana alokasi umum terhadap belanja daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi Pendapatan Asli Daerah.

Halim dan Abdullah (2003) mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali)”. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa secara terpisah, dana alokasi umum dan pendapatan daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan Rahmawati (2010). Perbedaan penelitian sekarang meneliti Pengaruh PAD dan DAU terhadap alokasi belanja daerah menggunakan periode tahun 2007-2010 pada Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta dan relatif lebih sempit dari pada peneliti terdahulunya.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya dengan melihat hasil analisis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini dapat di simpulkan sebagai berikut :

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kebijakan desentralisasi ditujukan untuk mewujudkan kemandirian daerah. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasar aspirasi masyarakat.

1. H_1 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL).

Melihat beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan penting bagi sebuah daerah dalam memenuhi belanjanya. Pendapatan Asli Daerah ini sekaligus dapat menunjukan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Pendaptan Asli Daerah yang didapat semakin memungkinkan daerah tersebut untuk memenuhi kebutuhan belanjanya sendiri tanpa harus tergantung pada pemerintah pusat. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Dana Alokasi Umum merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk

mempercepat pembangunan disamping itu tetap memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah.

1_a : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung (ABL).

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Jadi, Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010).

1_b : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung (ABL).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota. Tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum ini adalah pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan. Jaminan keseimbangan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat. Oleh karena itu Dana Alokasi Umum merupakan sumber dana yang dominan dan dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Sebagai tujuan dari desentralisasi yaitu untuk mempercepat pembangunan disamping itu tetap

memaksimalkan potensi daerah untuk membiayai kebutuhan daerah. Jadi, Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010).

2. H_2 : Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL).

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum secara bersama-sama mempengaruhi belanja tidak langsung. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010).

Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah mengalami penambahan karena alokasi belanja tidak langsung cenderung digunakan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tiap tahun terjadi kenaikan gaji pegawai, dibanding untuk pengalokasian belanja tidak langsung lainnya. Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap alokasi belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, belanja tidak terduga. Setiap tahun terjadi peningkatan belanja tidak langsung disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS. Sehingga Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap belanja tidak langsung.

- 2_a : Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung (ABTL).

Peningkatan pendapatan yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah mengalami pertambahan karena alokasi belanja tidak langsung cenderung digunakan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tiap tahun terjadi kenaikan gaji pegawai, dibanding untuk pengalokasian belanja tidak langsung lainnya. Dengan adanya kenaikan belanja pegawai mengorbankan komitmen pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Rahmawati (2010).

2_b : Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung (ABTL).

Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung yang dialokasikan untuk membiayai belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa, belanja bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, belanja tidak terduga. Setiap tahun terjadi peningkatan belanja tidak langsung disebabkan oleh kebijakan Pemerintah Pusat yang terus menambah jumlah PNS, serta kenaikan gaji PNS. Dengan demikian Dana Alokasi Umum (DAU) tidak terlalu signifikan, jika dibandingkan dengan kenaikan gaji pegawai tersebut. Namun didorong kewajiban untuk mengalokasikan belanja hibah sebagai komponen belanja tidak langsung. Sehingga Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh positif terhadap belanja tidak langsung. Dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi kasus pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Studi kasus adalah jenis penelitian terhadap suatu objek tertentu dimana hasil penelitian tersebut hanya berlaku pada tempat dimana penelitian dilakukan dan pada waktu tertentu.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta yang mengambil data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Daerah pada setiap kantor pemerintah daerah. Penelitian menggunakan data times series tahun 2007-2010.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada 07 Maret - 07 Juni 2012.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan objek penelitian, serta memberikan informasi tentang objek penelitian tersebut. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Badan Perencanaan pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dan Badan Pusat Statistik.

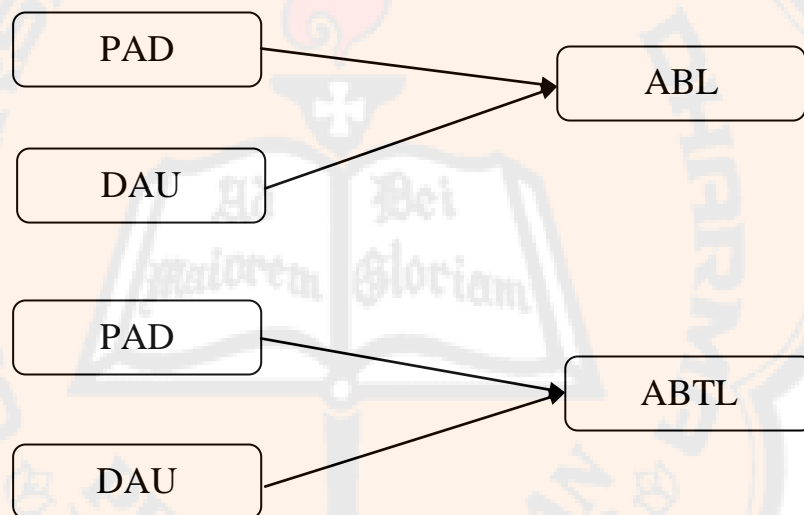
2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah hal yang menjadi pokok dari suatu penelitian.

Objek penelitian ini adalah data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Desain Penelitian

Desain penelitian menggambarkan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Alokasi Belanja.



Gambar I: Desain Penelitian

Keterangan:

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

ABL : Alokasi Belanja Langsung

ABTL : Alokasi Belanja Tidak Langsung

Kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD yang merupakan sumber pendapatan yang berasal dari daerah sendiri akan mempengaruhi Belanja Daerah selain itu Dana Alokasi Umum (DAU) yang berasal dari pemerintah pusat sebagai dana perimbangan akan mempengaruhi belanja daerah. Dengan demikian, semakin besar Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum maka Pemerintah Daerah akan mampu untuk membiayai Belanja Daerah.

PAD adalah Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode anggaran. Alokasi belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung.

E. Data yang Dicari

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer. Menurut Sunyoto (2001: 189), Data primer adalah “data yang dikumpulkan sendiri oleh organisasi yang menerbitkan atau menemukannya”. Data yang dikumpulkan berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2007-2010 yang berupa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasi Dana Alokasi

Umum (DAU), realisasi Belanja Daerah (BD). Peneliti mendapatkan data langsung dari masing-masing pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdiri dari empat kabupaten dan satu kota.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, laporan atau arsip-arsip dan data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Metode Studi pustaka

Metode Kepustakaan yaitu mengumpulkan data melalui literatur-literatur dan dengan meneliti semua dokumen-dokumen, buku-buku, catatan-catatan dana arsip serta refrensi lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

G. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2007: 31), Variabel adalah “sesuatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut kemudian diambil kesimpulannya”. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif kausal, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Pengujian ini untuk menganalisis

mengenai pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja daerah.

a. Variabel Bebas (Independen)

Menurut Sugiyono (2007: 33), Variabel bebas adalah “variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat”. Variabel-variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

b. Variabel Terikat (Dependen)

Menurut Sugiyono (2007: 33), Variabel terikat adalah “variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas”. Variabel-variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

2. Denifisi Operasional

a. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002: 133), Pendapatan asli daerah adalah “merupakan penerimaan yang diperoleh daerah yang bersumber sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan lain-lain yang sah”.

PAD = Pajak daerah + Retribusi daerah + Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini dapat diketahui dari pos Pendapatan Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta dari tahun 2007 sampai dengan 2010.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Nordiawan (2007: 56), Dana Alokasi Umum adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Menurut Nordiawan (2007: 48), Dana Perimbangan adalah “dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”. Dana perimbangan mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Umum (DAU) diperoleh dengan melihat dari Dana Perimbangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. DAU untuk suatu Daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Formula perhitungan DAU adalah :

$$\text{DAU} = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dimana

$$\text{Celah Fiskal} = \text{Kebutuhan Fiskal} - \text{Kapasitas Fiskal}$$

Dana Alokasi Umum dialokasikan atas dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Dimana celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah, sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai Negeri Sipil Daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum (kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengetasan kemiskinan), Sedangkan yang dimaksud dengan kapasitas fiskal adalah penerimaan daerah yang berasal dari potensi pajak daerah dan sumber daya alam yang dimiliki daerah.

Dengan demikian, daerah yang memiliki kapasitas fiskal tinggi dengan kebutuhan fiskalnya rendah maka perolehan Dana Alokasi Umum (DAU) yang akan didapatkan jumlahnya akan kecil. Sebaliknya bagi daerah yang kapasitas fiskalnya rendah, sementara kebutuhan fiskalnya tinggi, maka Dana Alokasi Umum yang akan didapatkan jumlahnya akan semakin besar.

c. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran Pemerintah Daerah pada suatu periode Anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan.

Alokasi Belanja Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari :

1. Belanja tidak langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

ABTL = belanja pegawai + belanja bunga + belanja subsidi +
belanja hibah + belanja bantuan sosial + belanja bagi
hasil + bantuan keuangan + belanja tidak terduga.

2. Belanja langsung adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

ABL = belanja pegawai + belanja barang dan jasa + belanja modal.

H. Teknik Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah analisis mengenai beberapa variabel independen dengan satu variabel dependen. Variabel-

variabel bebasnya (*independent variables*) adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi umum (DAU) yang akan dianalisis pengaruhnya terhadap alokasi belanja daerah yang diukur dengan belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai variabel dependen.

Sebelum melakukan pengujian dengan regresi linier berganda maka beberapa langkah harus dilakukan dengan beberapa alat uji :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan alokasi belanja daerah.

2. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006: 110), “Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal”. Untuk menguji apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik.

1. Analisis grafik

Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain melihat grafik histogram, uji normalitas dapat dilakukan dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika data distribusi normal maka garis yang menggambarkan sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

- Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola

distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

2. Analisis Statistik

Selain menggunakan analisis grafik, uji normalitas dapat dilakukan dengan analisis statistik non-parametrik *kolmogorov-smirnov* (K-S). Uji *Kolmogorov-Smirnov* dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 : Data residual berdistribusi normal

H_a : Data residual tidak berdistribusi normal

- Jika hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai probabilitas signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol ditolak yang berarti data residual terdistribusi tidak normal.
- Jika hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Menurut Ghazali (2006: 91), Variabel orthogonal adalah “variabel independent yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol”. Untuk mendeteksi

ada atau tidaknya multikolinearitas di dalam suatu model regresi adalah sebagai berikut:

- a. Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinearitas.
- c. Multikolinearitas dapat juga dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variation inflation factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai Tolerance > 0.10 atau sama dengan nilai VIF < 10 .

d. Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2006: 95), Uji autokorelasi “bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya)”. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini muncul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi berikutnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu/time series karena “gangguan” pada seorang individu/kelompok

cenderung mempengaruhi seorang individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Menurut Ghozali (2006: 103), cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi dengan menggunakan *Run Test*. *Run Test* merupakan bagian dari statistik non-parametrik digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. *Run Test* digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis.

Pengambilan keputusan pada uji Run Test adalah sebagai berikut:

H_0 : Residual (res_1) random (acak)

H_a : residual (res_1) tidak random

- Jika hasil uji Run Test menunjukkan nilai probabilitas signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual.
- Jika hasil uji Run Test menunjukkan nilai probabilitas tidak signifikan pada 0,05 maka hipotesis nol diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

e. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Menurut Ghozali (2006: 105), apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas.

3. Model Regresi

Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda linier yang digunakan untuk melihat pengaruh pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap alokasi Belanja Daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Data diolah dengan *software* SPSS versi 17. Menurut Ghozali (2006: 82), Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan “model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini ada dua persamaan regresi”.

Persamaan model regresi berganda pada penelitian ini adalah:

$$Y_1 = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e_1$$

dan

$$Y_2 = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + e_2$$

dimana :

Y1 = Belanja Langsung

Y2 = Belanja Tidak Langsung

α = Konstanta

X1 = PAD

X2 = DAU

b1 b2 = koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

e = error

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Menurut Ghozali (2006: 84), “Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen”. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk pengujian ini dilakukan dengan menggunakan uji F (F test). Hasil F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan $\alpha = 5\%$. Dari hasil uji F dapat diketahui :

1. Jika F hitung $>$ F tabel maka seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika F hitung $<$ F tabel maka seluruh variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

b. Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik t ini digunakan karena untuk memperoleh keyakinan tentang kebaikan dari model regresi dalam memprediksi. Hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut :

H_0 : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara individual dari variabel independen terhadap variabel dependen.

H_a : Terdapat pengaruh yang signifikan secara individual dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Menurut Ghozali (2006: 84), Pengujian dilakukan dengan uji t yaitu dengan membandingkan t tabel dengan t hitung dengan $\alpha = 5\%$.

Dari hasil uji t dapat diketahui :

1. Jika $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka variabel independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

Selain itu, bisa juga dilakukan dengan melihat *p-value* dari masing-masing variabel. Hipotesis diterima apabila *p-value* $< 5 \%$.

c. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Koefisien determinasi ini digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

Menurut Ghozali (2006: 83), “Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu”. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA

A. Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta

Daerah Istimewa Yogyakarta atau biasa disingkat dengan DIY adalah salah satu daerah otonom setingkat propinsi yang ada di Indonesia. Propinsi ini beribukota di Yogyakarta. Dari nama daerah ini yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah berdirinya propinsi ini, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

Menurut Babad Gianti, Yogyakarta atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa) adalah nama yang diberikan Paku Buwono II (raja Mataram 1719 – 1727) sebagai pengganti nama pesanggrahan Gartitawati. Yogyakarta berarti yoga yang makmur, sedangkan Ngayogyakarta Hadiningrat berarti yoga yang makmur dan yang paling utama. Nama Yogyakarta di ambil dari nama ibu kota Sanskrit Ayodhya dalam epos Ramayana. Dalam penggunaannya sehari-hari yogyakarta lazim diucapkan Jogja atau Ngayogyakarta (bahasa Jawa).

Sebelum Indonesia merdeka, Yogyakarta sudah mempunyai tradisi pemerintahan karena Yogyakarta merupakan Kasultanan, termasuk didalamnya terdapat Kadipaten Pakualaman. Daerah yang mempunyai asal-usul dengan pemerintahannya sendiri di jaman Hindia Belanda disebut Zelfbesturende Landschappen. Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat

berdiri sejak 1755 didirikan oleh Pangeran Mangkubumi yang kemudian bergelar Sultan Hamengku Buwono I. Kadipaten Pakualaman, berdiri sejak 1813, didirikan oleh Pangeran Notokusumo, (saudara Sultan Hamengku Buwono II) kemudian bergelar Adipati Paku Alam I.

Baik Kasultanan maupun Pakualaman, diakui oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kerajaan dengan hak mengatur rumah tangga sendiri. Semua itu dinyatakan di dalam kontrak politik. Terakhir kontrak Kasultanan tercantum dalam Staatsblad 1941 No. 47 dan kontrak politik Pakualaman dalam Staatsblad 1941 No. 577.

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan RI, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII membuat kesepakatan kepada Presiden RI, menyatakan bahwa Daerah Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman menjadi bagian wilayah Negara Republik Indonesia, serta bergabung menjadi satu mewujudkan satu kesatuan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pegangan hukumnya yaitu:

- a. Piagam kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 19 Agustus 1945 dari Presiden Republik Indonesia.
- b. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Amanat Sri Paku Alam VIII tertanggal 5 September 1945 (yang dibuat sendiri-sendiri secara terpisah).

c. Amanat Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paku Alam VIII tertanggal 30 Oktober 1945 (yang dibuat bersama dalam satu naskah).

Dari 4 Januari 1946 hingga 17 Desember 1949, Yogyakarta menjadi Ibukota Negara Republik Indonesia, pada masa perjuangan hampir saja Negara Republik Indonesia direbut kembali oleh Belanda. Oleh karena itu pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia yang berkumpul dan berjuang di Yogyakarta untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia juga mendirikan monumen serangan umum 1 maret 1949 untuk memperingati perjuangan di Yogyakarta.

Pada saat ini Kraton Yogyakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Puro Pakualaman oleh Sri Paduka Paku Alam IX. Keduanya memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam memelihara nilai-nilai budaya dan adat-istiadat Jawa dan merupakan pemersatu masyarakat Yogyakarta. Dengan dasar pasal 18 Undang-undang 1945, Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menghendaki agar kedudukan sebagai Daerah Istimewa untuk Daerah Tingkat I, tetap lestari dengan mengingat sejarah pembentukan dan perkembangan Pemerintahan Daerahnya yang sepatutnya dihormati.

Pasal 18 undang-undang dasar 1945 itu menyatakan bahwa “pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem Pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam Daerah-daerah yang bersifat Istimewa “.

Sebagai Daerah Otonom setingkat Propinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-undang No.3 tahun 1950, sesuai dengan maksud pasal 18 UUD 1945. Disebutkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah meliputi bekas Daerah/Kasultanan Yogyakarta dan Daerah Pakualaman. Sebagai ibukota Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, baik berasal dari sejarah maupun potensi yang ada, seperti sebagai kota perjuangan, kota kebudayaan, kota pelajar, dan kota pariwisata. Sebutan kota perjuangan untuk kota ini berkenaan dengan peran kota Yogyakarta dalam perjuangan bangsa Indonesia pada jaman Kolonial Belanda, jaman penjajahan Jepang, maupun pada jaman perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Yogyakarta pernah menjadi pusat kerajaan, Kerajaan Mataram, Kesultanan Yogyakarta, maupun Kadipaten Pakualaman.

Sebutan kota kebudayaan untuk kota ini berkaitan erat dengan peninggalan-peninggalan budaya yang bernilai tinggi semasa kerajaan-kerajaan tersebut yang sampai saat ini masih tetap dilestarikan. Sebutan ini juga berkaitan dengan banyaknya pusat-pusat seni dan budaya. Predikat sebagai kota pelajar berkaitan dengan sejarah dan peran kota ini dalam dunia pendidikan di Indonesia. Di samping adanya berbagai pendidikan di setiap jenjang pendidikan tersedia di propinsi ini, di Yogyakarta terdapat banyak mahasiswa dan pelajar dari seluruh daerah di Indonesia. Tidak berlebihan bila Yogyakarta disebut sebagai miniatur Indonesia.

Sebutan Yogyakarta sebagai kota pariwisata menggambarkan potensi propinsi ini dalam kacamata kepariwisataan. Yogyakarta adalah daerah tujuan wisata terbesar kedua setelah Bali. Berbagai jenis obyek wisata dikembangkan di wilayah ini, seperti wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya, wisata pendidikan. Disamping predikat-predikat di atas, sejarah dan status Yogyakarta merupakan hal yang menarik. Nama daerahnya memakai sebutan DIY sekaligus statusnya sebagai Daerah Istimewa. Status Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa berkenaan dengan runutan sejarah Yogyakarta, baik sebelum maupun sesudah Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia.

B. Geografis

1. Letak

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu provinsi di Indonesia memiliki status keistimewaan. Secara geografis Daerah Istimewa Yogyakarta terletak pada $7^{\circ}15'$ - $8^{\circ}15'$ Lintang Selatan dan garis $110^{\circ}5'$ - $110^{\circ}4'$ Bujur Timur.

2. Batas Wilayah

Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki batas wilayah yaitu :

- a. Sebelah Barat : Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah
- b. Sebelah Barat Laut : Kabupaten Magelang, Jawa Tengah
- c. Sebelah Timur Laut : Kabupaten Klaten, Jawa Tengah
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
- e. Sebelah Selatan : Samudera Indonesia.

3. Keadaan Alam

- a. Dibagian utara seluas kurang lebih 4 % tanah miring yang berkelanjutan dari gunung berapi dengan bersifat: wilayah hujan, kaya akan mata air dan sangat subur.
- b. Dibagian selatan/barat seluas kurang lebih 7 % dari barat ke arah selatan dengan ketinggian semakin rendah berakhir pada daratan pantai alluvial dengan tanah bersifat: wilayah hujan dan banyak mata air.
- c. Dibagian tengah seluas 41 % merupakan tanah datar dengan sifat tanah cukup subur, jaringan pengairan baik dengan penduduk yang padat.

4. Tipe Tanah

- a. Tanah Regosal/vulkanis muda yang terletak antara sungai Progo dan sungai Opak (di Kabupaten Sleman dan Bantul).
- b. Tanah Latosol dan Inargalit terletak di atas batu kapur terdapat di daerah Gunung Kidul dan perbukitan Kabupaten Bantul serta Kabupaten Kulonprogo.
- c. Tanah Alluvial dan Regosal terdapat di sepanjang selatan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo.

C. Pemerintahan

Pembagian DIY menjadi kabupaten-kabupaten dan kota yang berotonomi diatur dengan UU No. 15 Tahun 1950 (BN 1950 No. 44) dan UU No. 16 Tahun 1950 (BN 1950 No. 45). Kedua undang-undang tersebut

diberlakukan dengan PP No. 32 Tahun 1950 (BN 1950 No. 59). Menurut undang-undang tersebut DIY dibagi menjadi kabupaten-kabupaten Bantul (ibukota Bantul), Sleman (ibukota Sleman), Gunung Kidul (ibukota Wonosari), Kulon Progo (ibukota Wates), dan Kota Yogyakarta. Pada setiap kabupaten dipimpin oleh Bupati sementara untuk Kota Yogyakarta dipimpin oleh Walikota.

Sebagai Daerah Otonom, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1950 Nomor : 19 tahun 1950 terbagi dalam 5 Daerah Tingkat II yang terdiri satu daerah Kota Madya dan empat Kabupaten masing-masing :

- a. Kota Madya Yogyakarta, terdiri dari 14 Kecamatan dan 45 Kelurahan.
- b. Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman, terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa.
- c. Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, terdiri dari 17 Kecamatan dan 75 Desa.
- d. Kabupaten Daerah Tingkat II Kulonprogo, terdiri dari 12 Kecamatan dan 75 Desa.
- e. Kabupaten Daerah Tingkat II Gunung Kidul, terdiri dari 18 Kecamatan dan 144 Desa.

D. Penduduk

Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk

NO	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk
1	Kulonprogo	388.869
2	Bantul	911.503
3	Gunungkidul	675.382
4	Sleman	1.093.110
5	Yogyakarta	388.627
	Jumlah Provinsi DIY	3.457.491

Sumber: Data BPS Sensus Penduduk 2010

Ada dua faktor yang berkenaan dengan perkembangan penduduk di Propinsi DIY. Pertama, keberhasilan program Keluarga Berencana (KB) di propinsi ini. Program KB pada mulanya diorientasikan kepada penekanan jumlah kelahiran, telah meningkatkan prioritasnya kepada pembentukan keluarga sejahtera. Kedua, berkaitan dengan berbagai predikat yang melekat pada kota Yogyakarta, besarnya arus migrasi antar daerah, khususnya migrasi dari daerah/propinsi lain ke propinsi DIY.

Laju pertumbuhan penduduk di DIY antara 2003-2007 sebanyak 135.915 jiwa atau kenaikan rata-rata pertahun sebesar 1,1%. Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di DIY menunjukkan kecenderungan yang meningkat dari 72,4 tahun pada tahun 2002 menjadi 72,9 tahun pada tahun 2005. Ditinjau dari sisi distribusi penduduk menurut usia, terlihat kecenderungan yang semakin meningkat pada penduduk usia di atas 60 tahun. Salah satu cara untuk mengatasi masalah kependudukan dan ketenagakerjaan adalah dengan mengadakan program transmigrasi. Pelaksanaan pemberangkatan transmigran asal DIY sampai pada tahun 2008 melalui program transmigrasi sejumlah 76.495 Kk atau 274.926 Jiwa. Ditinjau dari

pola transmigrasi sudah mencerminkan partisipasi dan keswadayaan masyarakat, melalui Transmigrasi Umum (TU), Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Untuk penyebarannya sudah mencakup hampir seluruh Provinsi. Rasio jumlah transmigran swakarsa mandiri pada 2010 mencapai 20% dari total transmigran yang diberangkatkan.

E. Keadaan Sosial

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu masalah penting yang menjadi perhatian Pemerintah. Hal ini dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat dapat dijadikan sebagai salah satu indikator yang menunjukkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Apabila tingkat pendidikan semakin tinggi maka kualitas SDM yang ada juga akan semakin baik. Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sangat memperhatikan tingkat kualitas pendidikan dengan dibantu oleh pihak swasta. Beberapa faktor yang mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah ketersediaan sekolah yang memadai dengan sarana dan prasarana yang memadai.

Pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2010/2011 jenjang SD terdapat 1.858 yang terdiri dari 1.471 SD negeri dan 387 SD swasta. Pada jenjang SMP jumlah sekolah tercatat sebanyak 421 yang terdiri dari 214 negeri dan 207 swasta. Pada tingkatan yang lebih tinggi yaitu SMA terdapat 165 sekolah yang terdiri dari 70 negeri dan 95 swasta.

Untuk tingkat SMK terdapat sebanyak 195 sekolah yang terdiri dari 52 negeri dan 143 swasta.

2. Tenaga Kerja

Proporsi distribusi penduduk berdasarkan usia produktif memiliki akibat pada sektor tenaga kerja. Angkatan kerja di DIY pada 2010 sebesar 71,41%. Di sektor ekonomi yang menyerap tenaga kerja paling besar adalah sektor pertanian kemudian disusul sektor jasa-jasa lainnya. Sektor yang potensial dikembangkan yaitu sektor pariwisata, sektor perdagangan dan industri terutama industri kecil menengah serta kerajinan. Pengangguran di DIY menjadi problematika sosial yang cukup serius karena karakter pengangguran DIY menyangkut sebagian tenaga-tenaga profesional dengan tingkat Pendidikan Tinggi.

3. Peribadatan

Penduduk DIY mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 90,96%, selebihnya beragama Kristen, Katholik, Hindu, Budha. Sarana ibadah terus mengalami perkembangan, pada tahun 2007 terdiri dari 6214 masjid, 3413 musholla, 218 gereja, 139 kapel, 25 kuil/pura dan 24 vihara/klenteng.

Jumlah pondok pesantren pada tahun 2006 sebanyak 260, dengan 260 kyai dan 2.694 ustadz serta 38.103 santri. Sedangkan jumlah madrasah baik negeri maupun swasta terdiri dari 148 madrasah ibtidaiyah, 84 madrasah tsanawiyah dan 35 madrasah aliyah. Aktivitas keagamaan

juga dapat dilihat dari meningkatnya jumlah jamaah haji dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2007 terdapat 3.064 jamaah haji.

F. Perekonomian

Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2007-2010 didominasi oleh empat sektor. Empat sektor tersebut adalah sektor jasa-jasa service, perdagangan, hotel dan restoran, pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, dan industri pengolahan. Pada tahun tersebut perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta relatif baik dan stabil. Rata-rata pertumbuhan ekonomi berkisar 11 persen. Sedangkan lima sektor lainnya hanya menyumbangkan sedikit seperti sektor pertambangan dan penggalian, listrik, gas dan air bersih, konstruksi, pengangkutan dan komunikasi, dan keuangan, real estate dan jasa keuangan.

Sumber perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari Produk Domestik Regional tahun 2007-2010 yaitu :

Tabel 4.2 : Sumber Perekonomian DIY

Lapangan Usaha	2007	2008	2009	2010	Rata-rata
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	15,01%	15,73%	15,38%	14,56%	15,17%
Pertambangan dan Penggalian	0,79%	0,73%	0,71%	0,67%	0,72%
Industri Pengolahan	13,60%	13,29%	13,35%	14,02%	13,56%
Listrik, Gas dan Air Bersih	1,29%	1,28%	1,35%	1,33%	1,31%
Konstruksi	10,54%	10,70%	10,70%	10,60%	10,63%
Pengangkutan dan Komunikasi	10,08%	9,81%	9,20%	9,03%	9,53%
Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,22%	19,21%	19,72%	19,74%	19,47%
Keuangan, Real Estate dan Jasa Keuangan	9,69%	9,77%	9,88%	10%	9,83%
Jasa - Jasa Service	19,79%	19,46%	19,71%	20,07%	19,76%

Sumber: Data BPS DIY

BAB V

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Deskriptif

Dari hasil pengumpulan data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Belanja Daerah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 – 2010, maka statistik deskriptif yaitu minimum, maksimum, mean dan standar deviasi variabel sebagai berikut :

Tabel 5.1 Statistics Descriptive

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	20	28,878,356,546.00	179,423,640,058.00	88,885,534,230.55	52,062,556,174.99
DAU	20	365,042,000,000.00	592,594,528,000.00	485,947,422,800.00	80,364,857,822.20
BL	20	132,970,368,976.00	447,256,076,181.00	258,338,142,529.60	77,615,281,672.28
BTL	20	293,463,109,280.00	782,307,301,324.00	510,169,659,689,90	133,788,981,370,61
Valid N (listwise)	20				

Sumber: Data yang diolah 2012

1. Pendapatan Asli Daerah

- a. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 28.878.356.546. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah terendah di DIY diperoleh dari Kabupaten Gunung Kidul pada tahun 2007. Oleh karena itu Kabupaten Gunung Kidul masih sangat tergantung dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerahnya, sehingga Kabupaten Gunung Kidul harus meningkatkan PAD dengan menggali terus sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.
- b. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar Rp 179.423.640.058. Hasil penelitian menunjukkan Pendapatan Asli Daerah tertinggi di DIY diperoleh dari kota Yogyakarta pada tahun

2010. Oleh karena itu dengan tingginya PAD Kota Yogyakarta memiliki kemandirian otonomi daerah lebih besar dalam membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di DIY yang lainnya.

- c. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai rata-rata (mean) selama empat tahun sebesar Rp 88.885.534.230,55.
- d. Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 52.062.556.174,99 lebih kecil dari mean Rp 88.885.534.230,55 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

2. Dana Alokasi Umum

- a. Dana Alokasi Umum memiliki nilai minimum sebesar Rp 365.042.000.000. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum terendah di DIY diperoleh dari Kota Yogyakarta di tahun 2007. Dalam hal ini Kota Yogyakarta bisa mandiri dalam membiayai pelaksanaan otonomi daerah.
- b. Dana Alokasi Umum memiliki nilai maksimum sebesar Rp 592.594.528.000. Hasil penelitian menunjukkan Dana Alokasi Umum tertinggi di DIY diperoleh dari Kabupaten Sleman di tahun 2008. Hal ini dapat berarti Kabupaten Sleman masih bergantung pada dana dari Pemerintah Pusat.
- c. Dana Alokasi Umum memiliki nilai rata-rata (mean) selama empat tahun sebesar Rp 485.947.422.800,00.

- d. Dana Alokasi Umum memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 80.364.857.822,20 lebih kecil dari mean Rp 485.947.422.800,00.

3. Belanja Langsung

- a. Belanja langsung daerah memiliki nilai minimum sebesar Rp 132.970.368.976. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Langsung terendah di DIY diperoleh dari Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2009. Ini membuktikan Kabupaten Kulon Progo dengan wilayah daerah dapat membiyai belanja langsung daerahnya dengan dana sebesar Rp 132.970.368.976.
- b. Belanja langsung memiliki nilai maximum sebesar Rp 447.256.076.181. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Langsung tertinggi di DIY diperoleh dari Kabupaten Bantul pada tahun 2008. Ini membuktikan Kabupaten Bantul dalam mengalokasikan sebagian besar biayanya untuk belanja langsung kegiatan pembangunan daerah.
- c. Belanja langsung memiliki nilai rata-rata (mean) selama empat tahun sebesar Rp 258.338.142.529,60.
- d. Belanja langsung memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 77.615.281.672,28 lebih kecil dari mean sebesar Rp 258.338.142.529,60 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

4. Belanja Tidak Langsung

- a. Belanja tidak langsung memiliki nilai minimum sebesar Rp 293.463.109.280. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Tidak

Langsung terendah di DIY diperoleh dari Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2007. Ini membuktikan Kabupaten Kulon Progo dalam mengalokasikan belanja daerahnya hanya sebagian kecil untuk belanja tidak langsung dan sebagian besar dialokasikan untuk belanja langsung, sehingga dapat mempercepat proses pembangunan daerah tersebut.

- b. Belanja tidak langsung memiliki nilai maksimum sebesar Rp 782.307.301.324. Hasil penelitian menunjukkan Belanja Tidak Langsung tertinggi di DIY diperoleh dari Kabupaten Sleman pada tahun 2010. Ini membuktikan bahwa Kabupaten Sleman mengalokasikan belanja daerah sebagian besar anggaran hanya untuk belanja tidak langsung.
- c. Belanja tidak langsung memiliki nilai rata-rata (mean) selama empat tahun sebesar Rp 510,169,659,689,90.
- d. Belanja tidak langsung memiliki nilai standar deviasi sebesar Rp 133,788,981,370,61 lebih kecil dari mean sebesar Rp 510,169,659,689,90 menunjukkan bahwa distribusi data cenderung normal.

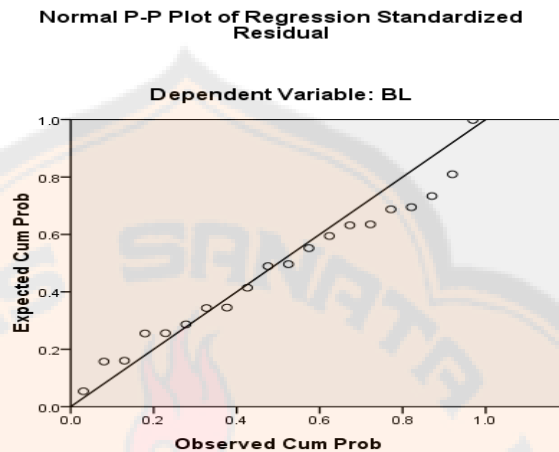
B. Uji Asumsi Klasik

1. Alokasi Belanja Langsung

a. Uji Normalitas

Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen (Y), variabel independen (X) atau keduanya

mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dari hasil pengolahan data didapat hasil sebagai berikut:



Gambar 2 : Normal Probability Plot

Hasil uji normalitas menunjukkan titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji *one sample tes Kolmogrov-Smirnov*. Uji ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Menurut Ghozali (2006: 110), “Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05”.

Tabel 5.2 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
	N	20
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000115
	Std. Deviation	5.25646711E10
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.155
	Negative	-.094
	Kolmogorov-Smirnov Z	.693
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.724

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah 2012

Berdasarkan nilai *one-sample kolmogorov-smirnov* pada tabel 5.2 diatas, menunjukkan besarnya nilai Nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 0,693 dan tidak signifikan pada 0,05 hal ini berarti hipotesis nol diterima yang mengindikasikan data residual terdistribusi normal dimana hasil uji ini konsisten dengan analisis grafik histogram dan *normal probability plot*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Dapat dilihat pada tabel 5.3 dibawah ini :

Tabel 5.3 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-9.849E9	7.896E10			
PAD	.829	.247	.556	.983	1.018
DAU	.400	.160	.415	.983	1.018

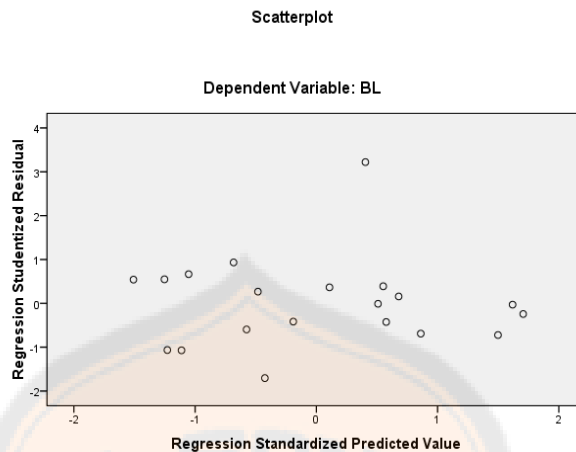
a. Dependent Variable: BL

Sumber: Data yang diolah 2012

Berdasarkan Tabel 5.3 tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD dan DAU memiliki angka *Variance Inflation Factors* (VIF) kurang dari 10 dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah Homokedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot*. Hasil analisis uji heteroskedastisitas ditunjukkan dalam grafik :



Gambar 3 : Scatterplot

Dari grafik *Scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga model regresi dapat dipakai untuk Alokasi Belanja Langsung berdasarkan masukan variabel independent Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Hasil pengujian dengan Run Test tabel :

Tabel 5.4 Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-9.94342E8
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	8
Z	-1.149
Asymp. Sig. (2-tailed)	.251

Sumber: Data yang diolah 2012

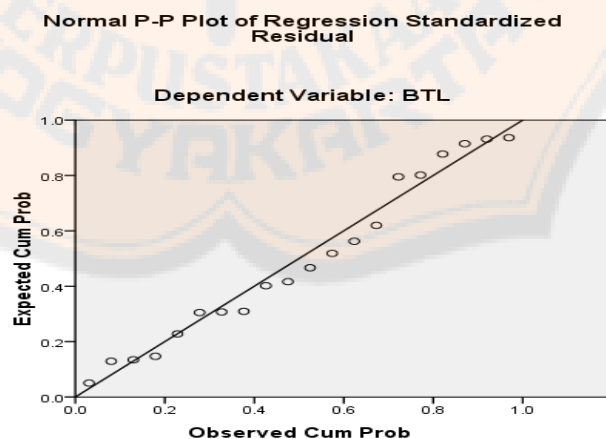
Run test dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak sistematis.

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai test adalah -9.94342 dengan probabilitas 0,251 diatas tingkat signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat di simpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

2. Alokasi Belanja Tidak Langsung

a. Uji Normalitas

Normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen (Y), variabel independen (X) atau keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Dari hasil pengolahan data didapat hasil sebagai berikut:



Hasil uji normalitas menunjukkan titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji *one sample tes Kolmogrov-Smirnov* ini digunakan untuk menghasilkan angka yang lebih detail dengan uji statistik, apakah suatu persamaan regresi yang akan dipakai lolos normalitas. Suatu persamaan regresi dikatakan lolos normalitas apabila nilai signifikasi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 (Ghozali, 2006: 110).

Tabel 5.5 One- Sample Kolmogrov – Smirnov Test

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	20
	Mean	-.0000332
	Std. Deviation	7.07665594E10
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.083
	Kolmogorov-Smirnov Z	.528
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.943

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data yang diolah 2012

Berdasarkan nilai *one-sample kolmogorov-smirnov* pada tabel 5.5 diatas, menunjukkan besarnya nilai Nilai *kolmogorov-smirnov* adalah 0,528 dan tidak signifikan pada 0,05 hal ini berarti hipotesis nol diterima yang mengindikasikan data residual terdistribusi normal dimana hasil uji ini konsisten dengan analisis grafik histogram dan *normal probability plot*. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Independen). Uji multikolinearitas dapat dilaksanakan menggunakan model regresi dan melakukan uji korelasi antar variabel independen dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Menurut Ghozali (2006: 91), “jika nilai tolerance value diatas 0,10 atau nilai *Variance Inflation Factors* (VIF) dibawah 10 maka tidak terjadi multikolinearitas”. Hasil uji multikolinearitas pada tabel berikut:

Tabel 5.6 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.602E11	1.085E11			
PAD	.815	.339	.317	.983	1.018
DAU	1.231	.220	.739	.983	1.018

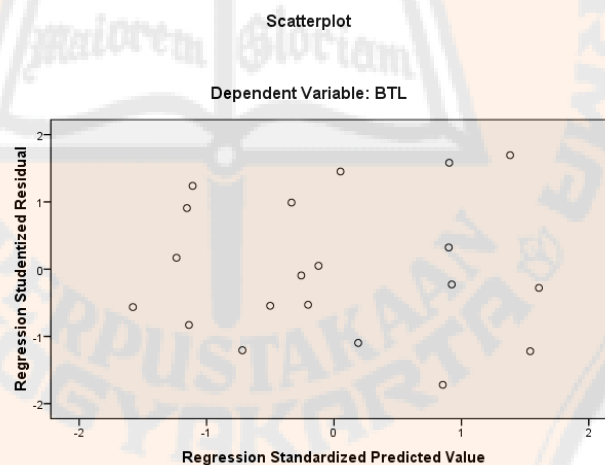
a. Dependent Variable: BTL
 Sumber: Data yang diolah 2012

Berdasarkan Tabel 5.6 tersebut di atas terlihat bahwa seluruh variabel independen yaitu PAD dan DAU memiliki angka *Variance Inflation Factors* (VIF) di bawah 10 dengan angka tolerance yang menunjukkan nilai lebih dari 0,1. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model yang terbentuk tidak terdapat adanya gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedisitas.

Menurut Ghozali (2006: 105), “model regresi yang baik adalah yang Homoskedasitas atau tidak terjadi Heteroskedisitas”. Didalam pengujian heteroskedasitas pada penelitian ini didasarkan pada *Scatterplot*. Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 5: Scatterplot

Berdasarkan grafik *Scatterplot* terlihat titik menyebar secara acak, tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas atau teratur, serta titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian

dapat dikatakan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

d. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Hasil pengujian dengan uji Run Test seperti tabel :

Tabel 5.7 Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-9.81182E9
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	10
Z	-.230
Asymp. Sig. (2-tailed)	.818

a. Median

Sumber: Data yang diolah 2012

Run test digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai test adalah -9.81182 dengan probabilitas 0,818 diatas tingkat signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol diterima, sehingga dapat di simpulkan bahwa residual random atau tidak terjadi autokorelasi antar nilai residual.

C. Hasil Analisis Data

1. Alokasi Belanja Langsung

Tabel 5.8 Regresi berganda ABL

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-9.849E9	7.896E10		-.125	.902		
PAD	.829	.247	.556	3.354	.004	.983	1.018
DAU	.400	.160	.415	2.502	.023	.983	1.018

a. Dependent Variable: BL
 Sumber: Data yang diolah 2012

Hasil persamaan regresi linier berganda ABL yaitu:

$$\text{Alokasi belanja langsung} = -9,849 + 0,829\text{PAD} + 0,400\text{DAU}$$

Persamaan tersebut dapat di artikan:

- Nilai Konstanta (α) sebesar -9,849 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen yaitu PAD dan DAU ($X_1=0, X_2=0$), maka alokasi belanja langsung setiap daerah akan menurun sebesar -9,849.
- Koefisien regresi PAD bertambah positif sebesar 0,829 artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar Rp 1 akan menaikkan belanja langsung sebesar Rp 0,829.
- Koefisien regresi DAU bertambah positif sebesar 0,400, artinya apabila terjadi perubahan variabel DAU sebesar Rp 1 akan menaikkan belanja langsung sebesar Rp 0,40.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji statistik F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna

terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut :

Tabel 5.9 Uji F ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	6.196E22	2	3.098E22	10.032	.001 ^a
Residual	5.250E22	17	3.088E21		
Total	1.145E23	19			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BL

Sumber: Data yang diolah 2012

Hasil pengujian Hipotesis Pertama

H_{01} : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_k = 0$ artinya:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung.

H_{a1} : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_k \neq 0$ artinya:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung.

Pada hasil pengujian regresi berganda hasil hipotesis pertama pada tabel 5.9 diatas menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 10,032 dan F tabel 3,591 ($F_{hitung} > F_{tabel}$) dengan probabilitas 0,001. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 maka dari hasil tersebut H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima yang berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap variabel belanja langsung. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

b. Pengujian Hipotesis secara parsial (Uji Statistik t)

Tabel 5.10 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-9.849E9	7.896E10		-.125	.902
PAD	.829	.247	.556	3.354	.004
DAU	.400	.160	.415	2.502	.023

a. Dependent Variable: BL

Sumber: Data yang diolah 2012

Menurut Ghozali (2006: 84), “uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen”.

Hasil pengujian Hipotesis 1_a

$H_{01a} : b_i = 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung.

$H_{a1a} : b_i \neq 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung.

Pada hasil pengujian regresi hipotesis 1_a pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan sebesar 0,004 hasil ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$. Dari hasil pengujian t hitung sebesar 3,354 dan t tabel 1,740 (t hitung > t tabel) maka dari hasil tersebut H_{01a} ditolak dan H_{a1a} diterima. Dengan demikian maka sesuai dengan hipotesis dapat disimpulkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung atau semakin tinggi Pendaptan Asli

Daerah maka Alokasi Belanja Langsung akan meningkat (semakin besar).

Hasil pengujian hipotesis 1_b

$H_{o1b}: b_i = 0$ Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung.

$H_{a1b}: b_i \neq 0$ Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung.

Pada hasil pengujian regresi hipotesis 1_b pada tabel 5.10 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum secara statistik signifikan sebesar 0,023 hasil ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$. Hasil dari t hitung sebesar 2,502 dan t tabel 1,740 (t hitung > t tabel) sehingga berdasarkan hasil tersebut maka H_{o1b} ditolak dan H_{a1b} diterima. Dengan demikian maka sesuai dengan hipotesis dapat disimpulkan secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung atau semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Alokasi Belanja Langsung akan meningkat (semakin besar).

c. Koefisien Determinasi

Tabel 5.11 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.541	.487	5.55708E10

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BL

Sumber: Data yang diolah 2012

Pada tabel 5.9 diatas diperoleh adjusted R square sebesar 0,487 atau (48,7%). Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen (PAD dan DAU) terhadap variabel dependen (BL) sebesar 48,7%. Sedangkan sisanya (100% - 48,7% = 51.3%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R Square.

Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Dari hasil regresi didapat nilai 5,557 hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam memprediksi belanja langsung sebesar 5,557. Menurut Priyatno (2009 : 81), “jika standard error of the estimate kurang dari standar deviasi Y, maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y”.

2. Alokasi Belanja Tidak Langsung

Tabel 5.12 Regresi linier berganda ABTL

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.602E11	1.085E11		-1.477	.158		
PAD	.815	.339	.317	2.401	.028	.983	1.018
DAU	1.231	.220	.739	5.597	.000	.983	1.018

a. Dependent Variable: BTL

Sumber: Data yang diolah 2012

Hasil persamaan regresi berganda ABTL yaitu:

$$\text{Alokasi belanja tidak langsung} = -1,602 + 0,815\text{PAD} + 1,231\text{DAU}$$

Persamaan tersebut dapat di artikan:

- Konstanta sebesar -1,602 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel independen dianggap konstan ($X_1=0$, $X_2=0$), maka alokasi belanja tidak langsung setiap daerah akan menurun sebesar -1,602.
- Koefisien regresi PAD bertambah positif sebesar 0,815, artinya apabila terjadi perubahan PAD sebesar Rp 1 akan menaikkan belanja tidak langsung sebesar Rp 0,815.
- Koefisien regresi DAU bertambah positif sebesar 1,231, artinya apabila terjadi perubahan variabel DAU sebesar Rp 1 akan menaikkan belanja tidak langsung sebesar Rp 1,231.

a. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk melihat apakah secara keseluruhan variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat. Dari hasil pengujian simultan diperoleh sebagai berikut:

Tabel 5.13 ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
¹ Regression	2.410E23	2	1.205E23	20.671	.000 ^a
Residual	9.910E22	17	5.829E21		
Total	3.401E23	19			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BTL

Sumber: Data yang diolah 2012

Hasil pengujian Hipotesis Kedua

H_{02} : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_k = 0$ artinya:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung.

H_{a2} : $\beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_k \neq 0$ artinya:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung.

Pada hasil pengujian hipotesis Kedua pada tabel 5.13 diatas menunjukkan hasil perhitungan statistik uji F sebesar 20.671 dan F tabel sebesar 3,591 dengan probabilitas 0,000 maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Karena probabilitas jauh lebih kecil dari 0,05 yang berarti secara simultan seluruh variabel independen PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap variabel belanja tidak langsung. Dengan demikian model regresi ini dapat menjelaskan PAD dan DAU secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap belanja tidak langsung.

b. Pengujian hipotesis secara parsial (Uji Statistik t)

Tabel 5.14 Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1.602E11	1.085E11		-1.477	.158
PAD	.815	.339	.317	2.401	.028
DAU	1.231	.220	.739	5.597	.000

a. Dependent Variable: BTL
 Sumber: Data yang diolah 2012

Menurut Ghozali (2006: 84), “uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen”.

Hasil pengujian Hipotesis 2_a

$H_{0_{2a}}: b_i = 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung.

$H_{a_{2a}}: b_i \neq 0$ Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung.

Pada hasil pengujian regresi hipotesis 2_a pada tabel 5.14 menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah secara statistik signifikan sebesar 0,028 hasil ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$. Hasil dari t hitung sebesar 2,401 dan t tabel 1,740 (t hitung > t tabel) sehingga berdasarkan hasil tersebut maka $H_{0_{2a}}$ ditolak dan $H_{a_{2a}}$ diterima. Dengan demikian maka sesuai dengan hipotesis dapat disimpulkan secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung atau semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka Alokasi Belanja Tidak Langsung akan meningkat (semakin besar).

Hasil pengujian hipotesis 2_b

$H_{0_{2b}}: b_i = 0$ Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung.

$H_{a_{2b}}: b_i \neq 0$ Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung.

Pada hasil pengujian regresi hipotesis 2_b pada tabel 5.14 menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Umum secara statistik signifikan sebesar 0,00 hasil ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar $\alpha = 0,05$. Hasil dari t hitung sebesar 5,597 dan t tabel 1,740 (t hitung $>$ t tabel) sehingga berdasarkan hasil tersebut maka $H_{0_{2b}}$ ditolak dan $H_{a_{2b}}$ diterima. Dengan demikian maka sesuai dengan hipotesis dapat disimpulkan secara parsial Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung atau semakin tinggi Dana Alokasi Umum maka Alokasi Belanja Tidak Langsung akan meningkat (semakin besar).

c. Koefisien Determinasi

Hasil nilai *R-Square* (R^2) dari regresi digunakan oleh variabel-variabel:

Tabel 5.15 Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.674	7.63493E10

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b . Dependent Variable: BTL

Sumber: Data yang diolah 2012

Pada tabel 5.15 diatas diperoleh adjusted R square sebesar 0,674 atau (67,4%). Hal ini menunjukkan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen (PAD dan DAU) terhadap variabel dependen (BTL) sebesar 67,4%. Sedangkan sisanya (100% - 67,4% = 32,6%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjusted R Square adalah nilai R Square yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R Square.

Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya kesalahan model regresi dalam memprediksi nilai Y. Dari hasil regresi didapat nilai 7,634 hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam memprediksi belanja langsung sebesar 7,634.

Tabel 5.16 Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No	Hipotesis	Hasil Uji
H ₁	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum(DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL)	Diterima
H _{1a}	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL).	Diterima
H _{1b}	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL).	Diterima
H ₂	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum(DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL)	Diterima
H _{2a}	Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL).	Diterima
H _{2b}	Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL).	Diterima

D. Pembahasan Hipotesis

1. Hipotesis Pertama

Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif pada hipotesis pertama yang menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL)". Dari hasil nilai signifikansi uji F secara simultan yang dihasilkan oleh PAD dan DAU lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001. Hasil

penelitian ini sesuai dengan pendapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap belanja langsung. Hasil penelitian Puspita Sari dan Yahya (2009) juga menyatakan bahwa secara simultan PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.

Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin besar Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh maka akan semakin besar pula dana yang harus di salurkan lewat belanja langsung untuk melakukan aktivitas pemerintah dan program-program pembangunan daerah. Menurut Halim (2007) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah. Sesuai dengan hasil penelitian diatas, maka semakin tinggi Dana Alokasi Umum yang diperoleh Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat, maka akan semakin tinggi pula alokasi belanja langsung.

Hipotesis 1_a

Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif pada hipotesis 1_a yang menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL)". Dari hasil nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,004. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah maka akan

mengakibatkan kenaikan pada Alokasi Belanja Langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap belanja langsung.

Hipotesis 1_b

Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif pada hipotesis 1_b yang menyatakan bahwa "Dana Alokasi Umum" (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Langsung (ABL)". Dari hasil nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,023. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Umum maka akan mengakibatkan kenaikan pada Alokasi Belanja Langsung.

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Langsung. Menurut hasil penelitian Puspita Sari dan Yahya (2009) menyatakan bahwa secara parsial DAU mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja langsung.

2. Hipotesis Kedua

Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif pada hipotesis kedua yang menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL)". Dari hasil nilai signifikansi uji F secara

simultan yang dihasilkan PAD dan DAU lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Tidak Langsung. Hasil penelitian Maemunah (2006) juga menyatakan bahwa DAU dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dalam hal ini belanja tidak langsung merupakan bagian dari belanja daerah.

Hipotesis 2_a

Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif pada hipotesis 2_a yang menyatakan bahwa "Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL)". Dari hasil nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,028. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah maka akan mengakibatkan kenaikan pada Alokasi Belanja Tidak Langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Tidak Langsung. Hasil penelitian Maemunah (2006) juga menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Dalam hal ini belanja tidak langsung merupakan bagian dari belanja daerah.

Hipotesis 2_b

Hasil penelitian ini menemukan pengaruh positif pada hipotesis 2_b yang menyatakan bahwa "Dana Alokasi Umum" (DAU) berpengaruh positif terhadap Alokasi Belanja Tidak Langsung (ABTL)". Dari hasil nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,00. Sesuai dengan arah koefisiennya yang positif maka hal ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi kenaikan pada Dana Alokasi Umum maka akan mengakibatkan kenaikan pada Alokasi Belanja Tidak Langsung. Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh Positif terhadap Belanja Tidak Langsung.

Hasil penelitian Maemunah (2006) juga menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif antara Dana Alokasi Umum terhadap belanja daerah. Seperti yang di ketahui belanja tidak langsung merupakan bagian dari belanja daerah. Menurut Abdul Halim (2007) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan transfer yang bersifat umum dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatasi ketimpangan horizontal yang bertujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja langsung. Dari hasil penelitian empat kabupaten dan satu kota Daerah Istimewa Yogyakarta maka PAD dan DAU secara simultan masih diperlukan terutama untuk melakukan belanja langsung. Dari hasil nilai signifikansi uji F secara simultan yang dihasilkan oleh PAD dan DAU lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,001 serta $F_{hitung} 10.032 > F_{tabel} 3,591$. Dari hasil penelitian secara parsial bahwa peran PAD lebih dominan dibandingkan dengan DAU untuk belanja langsung. Dari hasil perhitungan uji t hitung PAD 3,354 sementara DAU 2,502. Hal ini disebabkan karena belanja langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal sebagian besar masih mengandalkan dari hasil pendapatan asli daerah itu sendiri. Hal ini berarti semakin tinggi PAD yang diperoleh dari pajak, retribusi, laba usaha daerah serta pendapatan lain-lain yang sah serta DAU maka semakin besar Belanja langsung Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa belanja langsung pemerintah daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta masih sangat bergantung kepada besarnya pendapatan asli daerah yang mampu dihasilkan oleh pemerintah daerah.

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap alokasi belanja tidak langsung. Dari hasil penelitian empat kabupaten dan satu kota Daerah Istimewa Yogyakarta maka PAD dan DAU secara simultan masih sangat diperlukan terutama untuk melakukan belanja tidak langsung. Dari hasil nilai signifikansi uji F secara simultan yang dihasilkan oleh PAD dan DAU lebih kecil dari 0,05 yaitu 0,000 serta F hitung $20.671 > F$ tabel 3,591. Dari hasil penelitian secara parsial bahwa peran DAU lebih dominan dibandingkan dengan PAD untuk belanja langsung. Dari hasil perhitungan uji t hitung DAU 5,597 sementara PAD 2,401. Hal ini disebabkan karena belanja tidak langsung yang terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagian besar dibiayai dari hasil Dana Alokasi Umum. Hal ini untuk membantu daerah dan pemerataan sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. Pemerintah Daerah yang memiliki PAD dan DAU tinggi maka pengeluaran untuk alokasi belanja tidak langsung juga semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum masih sangat dibutuhkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga pemerintah daerah dapat menyelenggarakan dan membiayai daerahnya untuk kepentingan belanja tidak langsung.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat pos atau item di Alokasi Belanja Tidak Langsung yang tidak konsisten ada pada setiap tahunnya, seperti: hibah, subsidi dan belanja tak terduga.

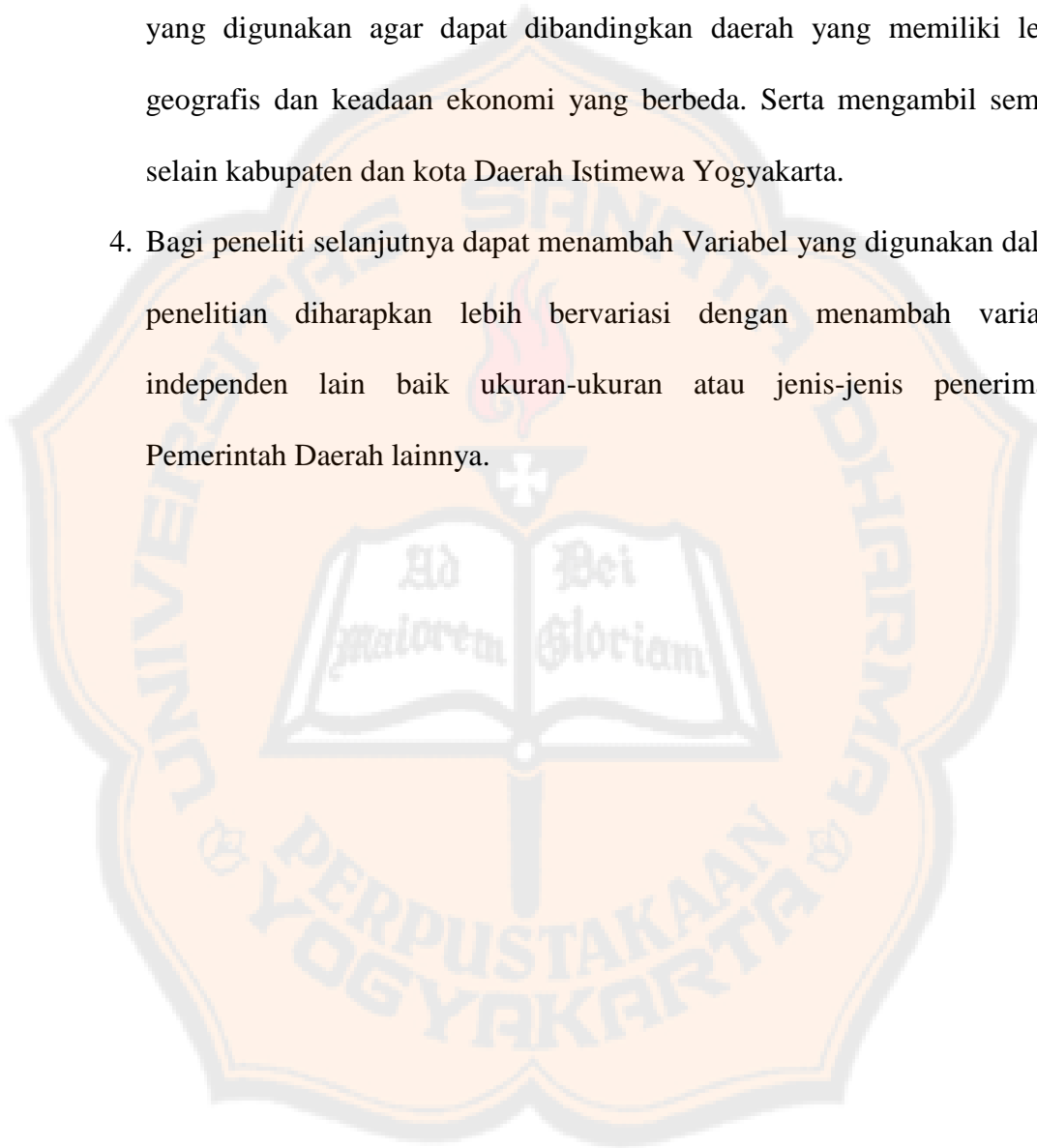
C. Saran

Setelah melakukan penelitian pada Pemerintah Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis mencoba memberikan saran yang sekiranya diperlukan dan bermanfaat bagi Pemerintah Daerah maupun bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat penulis berikan antara lain:

1. Bagi pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta agar dapat berusaha untuk mengoptimalkan tingkat Pendapatan Asli Daerah dengan mengoptimalkan pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah serta misalnya dengan memberikan kesempatan bagi putra - putri daerah untuk mengelola/bekerjasama dengan pihak -pihak yang mampu mengelola sumber daya yang dimiliki daerah, sehingga sumber-sumber pendapatan daerah mampu dimanfaatkan sebaik mungkin dan hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah akan semakin meningkat dan dapat meningkatkan alokasi belanja daerah sehingga otonomi daerah dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi Pemerintah daerah Istimewa Yogyakarta agar terus mengupayakan dan mengoptimalkan Dana Alokasi Umum bagi daerahnya, sehingga dapat menjalankan daerahnya. Bagi pemerintah pusat agar lebih memperhatikan

daerah–daerah yang tertinggal dan membutuhkan dana untuk melangsungkan kegiatan daerah.

3. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas daerah penelitian yang digunakan agar dapat dibandingkan daerah yang memiliki letak geografis dan keadaan ekonomi yang berbeda. Serta mengambil sampel selain kabupaten dan kota Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah Variabel yang digunakan dalam penelitian diharapkan lebih bervariasi dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan Pemerintah Daerah lainnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2002. *Sistem Akuntansi Sektor Publik..* Salemba Empat, Jakarta.
- Bawono, Icku Ranga dan M. Novelsyah. 2012. *Tata cara Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Bendahara pada SKPD dan SKPKD.* Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS.* Edisi 4. Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, Abdul. 2001. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.* UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2004. *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah.* Edisi Revisi UPP AMP YKPN, Yogyakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Edisi Ketiga. Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul dan M. Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah.* Salemba Empat, Jakarta.
- Mahsun, Moh, Firma Sulistiyowati dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik.* Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Maimunah, Mutiara. 2006. “*Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera”. *Proceedings.* Simposium Nasional Akuntansi IX, Padang.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah.* Penerbit Andi, Yogyakarta.

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang No. 34 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

_____. 2004. *Undang-Undang No. 32 tentang Pemerintahan Daerah*.

_____. 2004. *Undang-Undang No. 33 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2006. No. 13 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Prakosa, Kesit Bambang. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Alokasi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Jawa Tengah dan DIY. *Jurnal JAAI Volume 8 No.2*. (Desember). Hal: 101-119.

Priyatno, Dwi. 2009. *Mandiri Belajar SPSS untuk Analisis Data dan Uji Statistik*. Edisi Ketiga. Mediakom, Yogyakarta.

Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendaptn Asli Daerah (PAD) terhadap belanja langsung". *Skripsi*. Universitas Sumatera Utara, Medan.

Rahmawati, Nur Indah. 2010. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Alokasi Belanja daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah". *Skripsi dipublikasikan*. Universitas Diponegoro, Semarang.

Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media, Jakarta.

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Edisi Kesepuluh. CV Alfabeta, Bandung.

Sukriy dan Halim Abdullah. “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah:Studi Kasus Kabupaten/Kota Di Jawa dan Bali”. *Proceedings*. Simposium Nasional Akuntansi VI:1140-1159, Surabaya.

<http://www.pemda-diy.go.id/>

<http://www.depkeu.go.id/Ind/>

<http://yogyakarta.bps.go.id/>





LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Keparipihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN
070/2048/V/3/2012

Membaca Surat : DEKAN FAK EKONOMI USD YOGYAKARTA Nomor : 31/KAPRODI AKT/1025/III/2012
Tanggal : 02 Maret 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ARSENSIUS AGRIPA NIP/NIM : 082114098
 Alamat : JL MRICAN TROMOL POS 29 YOGYAKARTA
 Judul : PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAN DANA ALOKASI UMUM (DAU) TERHADAP ALOKASI BELANJA DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN /KOTA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.
 Lokasi : 1. - , , Kota/Kab. KULON PROGO
 2. - , , Kota/Kab. BANTUL
 3. - , , Kota/Kab. GUNUNG KIDUL
 4. - , , Kota/Kab. SLEMAN
 5. - , , Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA
 6. - , , Kota/Kab.
 7. - , , Kota/Kab.
 Waktu : 07 Maret 2012 s/d 07 Juni 2012

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walkota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjapro.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjapro.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 07 Maret 2012

An Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
Ub.

PLH Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Drs. Sugeng Irianto, M.Kes.
NIP. 19620225 198803 1 008

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman, cq Bappeda
3. Bupati Bantul cq Bappeda
4. Bupati Kulon Progo, cq. KPT
5. Bupati Gunung Kidul Cq. KPPTSP
6. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Pendidikan

7. DEKAN FAK EKONOMI USD YOGYAKARTA
8. Yang Bersangkutan

Lampiran Data Pendapatan Asli Daerah (DIY)

Daerah	PAD			
	2007	2008	2009	2010
Bantul	Rp 57.229.726.493,62	Rp 69.800.761.508,85	Rp 88.691.362.690,38	Rp 81.637.099.293,07
Sleman	Rp 120.656.548.721,00	Rp 140.631.359.142,43	Rp 157.231.267.811,84	Rp 163.056.459.137,93
Kulon Progo	Rp 38.637.833.503,34	Rp 42.289.208.476,81	Rp 39.358.629.412,10	Rp 48.280.640.675,16
Gunung Kidul	Rp 28.878.356.546,15	Rp 32.906.592.912,97	Rp 38.455.406.172,11	Rp 42.542.031.388,61
Kota Yogyakarta	Rp 114.098.350.942,31	Rp 132.431.571.514,72	Rp 161.473.838.209,95	Rp 179.423.640.057,51

Lampiran Data Dana Alokasi Umum (DIY)

Daerah	DAU			
	2007	2008	2009	2010
Bantul	Rp 524.293.000.000,00	Rp 583.169.351.000,00	Rp 568.502.143.000,00	Rp 573.512.337.000,00
Sleman	Rp 543.065.000.000,00	Rp 592.594.528.000,00	Rp 587.857.778.000,00	Rp 563.320.892.000,00
Kulon Progo	Rp 374.760.000.000,00	Rp 403.656.783.000,00	Rp 413.081.642.000,00	Rp 411.293.618.000,00
Gunung Kidul	Rp 459.851.000.000,00	Rp 504.395.748.000,00	Rp 508.212.308.000,00	Rp 521.293.704.000,00
Kota Yogyakarta	Rp 365.042.000.000,00	Rp 411.257.232.000,00	Rp 414.345.330.000,00	Rp 395.444.062.000,00

Lampiran Data Alokasi Belanja Langsung

Daerah	Alokasi Belanja Langsung			
	2007	2008	2009	2010
Bantul	Rp 225.339.820.093,00	Rp 447.256.076.181,00	Rp 268.873.868.148,00	Rp 286.872.331.518,00
Sleman	Rp 270.971.305.163,48	Rp 307.483.849.775,00	Rp 343.740.331.808,64	Rp 349.295.097.580,31
Kulon Progo	Rp 199.376.997.814,00	Rp 215.131.354.044,00	Rp 132.970.368.976,00	Rp 138.942.748.540,00
Gunung Kidul	Rp 232.826.274.380,00	Rp 268.037.128.863,00	Rp 194.199.606.219,52	Rp 144.645.151.775,00
Kota Yogyakarta	Rp 244.126.409.488,00	Rp 283.266.315.571,74	Rp 309.005.479.533,80	Rp 304.402.335.119,00

Lampiran Belanja Tidak Langsung

Daerah	Alokasi Belanja Tidak Langsung			
	2007	2008	2009	2010
Bantul	Rp 451.495.661.530,06	Rp 598.167.227.346,78	Rp 634.893.132.281,01	Rp 725.484.515.717,49
Sleman	Rp 481.142.670.728,88	Rp 599.135.140.635,50	Rp 672.286.269.326,73	Rp 782.307.301.323,83
Kulon Progo	Rp 293.463.109.279,71	Rp 382.928.579.673,75	Rp 444.766.627.124,47	Rp 473.959.882.626,54
Gunung Kidul	Rp 342.857.476.985,34	Rp 449.265.098.369,29	Rp 500.045.198.741,32	Rp 620.545.035.146,71
Kota Yogyakarta	Rp 325.039.559.643,96	Rp 415.300.348.549,04	Rp 474.846.213.225,86	Rp 535.464.145.542,43

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 5 Tahun 2008
 TANGGAL : 6 Oktober 2008

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (SEBELUM KONVERSI)
 TAHUN ANGGARAN 2007
 (AUDITED)

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SIS/
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN:				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	94.896.446.720,00	120.656.548.721,00	127,15	25.760.102.001,00
4.1.1	Pajak Daerah	42.000.000.000,00	56.287.665.731,91	119,73	8.287.665.731,91
4.1.3	Retribusi Daerah	39.299.207.160,00	49.965.628.030,57	104,24	1.666.420.870,57
4.1.4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.634.323.740,00	5.732.297.630,18	101,74	97.973.890,18
4.1.5	Lain-lain PAD yang sah	7.962.915.820,00	23.670.957.328,34	297,26	15.708.041.508,34
4.2	Dana Perimbangan	615.295.000.000,00	621.561.288.361,00	101,02	6.266.288.361,00
4.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak & Non Pajak	62.079.000.000,00	68.345.288.361,00	110,09	6.266.288.361,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	543.065.000.000,00	543.065.000.000,00	100,00	0,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	100,00	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	65.524.981.600,00	82.786.349.010,00	126,34	17.261.367.410,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	2.062.081.450,00	0,00	2.062.081.450,00
4.3.4	Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	48.924.981.600,00	52.201.913.300,00	106,70	3.276.931.700,00
4.3.5	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	100,00	0,00
4.3.6	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	8.600.000.000,00	12.799.500.000,00	148,83	4.199.500.000,00
4.3.7	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Pusat untuk Pendidikan	0,00	5.613.532.600,00	0,00	5.613.532.600,00
4.3.8	Kompensasi Pajak Penghasilan	0,00	2.109.321.660,00	0,00	2.109.321.660,00
	Jumlah	775.716.428.320,00	825.004.186.092,00	106,35	49.287.757.772,00
5	BELANJA				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	554.831.040.343,22	481.142.670.728,88	86,72	(73.688.369.614,34)
5.1.1	Belanja Pegawai/Personalia	462.625.878.481,22	405.719.782.499,00	87,70	(56.906.095.982,22)
5.1.2	Belanja Bunga	144.000.000,00	136.590.831,64	94,85	(7.409.168,36)
5.1.3	Belanja Subsidi	7.750.204.585,00	7.743.887.439,00	99,92	(6.317.146,00)
5.1.4	Belanja Bantuan Sosial	48.511.290.033,80	39.938.343.865,00	82,33	(8.572.946.168,80)
5.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	18.803.945.253,20	18.615.842.894,24	99,00	(188.102.358,96)
5.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa	9.062.420.000,00	8.988.223.200,00	99,18	(74.196.800,00)
5.1.7	Belanja Tidak Terduga	7.933.301.990,00	0,00	0,00	(7.933.301.990,00)
5.2	BELANJA LANGSUNG	342.007.564.666,60	270.971.305.163,48	79,23	(71.036.259.503,12)
5.2.1	Belanja Pegawai/Personalia	71.197.190.471,00	62.948.663.526,00	88,41	(8.248.506.945,00)
5.2.2	Belanja Barang Jasa	117.576.601.332,60	98.462.427.536,50	83,74	(19.114.173.797,10)
5.2.3	Belanja Modal	153.233.772.862,00	109.560.194.100,98	71,50	(43.673.578.761,02)
	Jumlah	896.838.605.009,82	752.113.975.892,36	83,86	(144.724.629.117,46)
	Surplus/(Defisit)	(121.122.176.689,82)	72.890.210.199,64	(60,18)	194.012.386.889,46

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI		SIS/
			RP	%	
1	2	3	4	5	6
6	PEMBIAYAAN				
6.1	PENERIMAAN DAERAH				
6.1.1	Penggunaan SILPA	135.517.734.154,82	135.517.734.151,82	100,00	(3,00)
6.1.6	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	1.750.823.200,00	0,00	1.750.823.200,00
	Jumlah	135.517.734.154,82	137.268.557.351,82	101,29	1.750.823.197,00
6.2	Pengeluaran Daerah				
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemda	9.750.000.000,00	9.750.000.000,00	100,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Pinjaman Daerah-Pemerintah Pusat	138.000.000,00	137.744.928,40	99,82	(255.071,60)
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
6.2.6	Restitusi Pajak	7.557.465,00	7.557.465,00	100,00	0,00
	Jumlah	14.395.557.465,00	14.395.302.393,40	99,99	(255.071,60)
	Pembiayaan Netto	121.122.176.689,82	122.873.254.958,42	101,45	1.751.078.268,60
	SILPA	0,00	195.763.465.158,06		

BUPATI SLEMAN,

 IBNU SUBYANTO

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR : 13 Tahun 2009
 TANGGAL: 24 Juli 2009

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2008
 (SEBELUM KONVERSI)
 (AUDITAN)

URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	PENDAPATAN	884.336.182.392,00	846.476.028.802,43	107,93	62.239.845.700,43	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	106.758.621.343,00	140.621.359.142,43	131,73	33.872.737.799,43	
1.1.1	Pajak Daerah	49.171.423.443,00	61.020.899.130,70	124,10	11.849.276.687,70	
1.1.2	Retribusi Daerah	44.863.793.880,00	52.065.472.037,03	116,00	7.181.672.177,93	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	6.625.758.700,00	6.670.980.800,43	100,77	51.223.600,43	
1.1.4	lain-lain PAD yang Sah	6.677.450.820,00	20.868.007.153,37	343,37	14.790.556.333,37	
1.2	Dana Perimbangan	676.230.225.159,00	688.941.478.722,00	101,88	12.711.253.563,00	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak	72.986.811.998,00	85.884.282.522,00	117,67	12.897.470.524,00	
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	497.883.361,07	311.688.900,00	62,60	(186.215.161,00)	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	592.594.530.000,00	592.594.528.700,00	100,00	(2.000,00)	
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	10.151.000.000,00	10.151.000.000,00	100,00	0,00	
1.3	lain-lain Pendapatan yang Sah	101.347.325.659,00	116.103.190.228,00	115,35	15.555.864.569,00	
1.3.1	Hibah	16.485.586.000,00	1.486.586.000,00	100,00	0,00	
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	2.971.343.600,00	1.071.483.827,00	100,00	140.132,00	
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Kemda Lainnya	56.603.375.400,00	7.027.130.800,00	126,59	15.053.555.400,00	
1.3.3.1	Bantuan Tunjangan Pen. Idikan	19.242.000.000,00	19.242.000.000,00	100,00	0,00	
1.3.3.2	Kompensasi Pajak	6.093.820.600,00	1.096.820.600,00	100,05	3.000.000,00	
1.3.3.3	lain-lain	0,00	499.169.000,00	0,00	499.169.000,00	
*	BELANJA	1.050.868.430.555,06	906.618.920.411,20	86,27	(144.249.440.144,56)	
2.1	Belanja Tidak Langsung	665.827.250.480,06	599.135.140.625,53	89,98	(66.687.110.353,56)	
2.1.1	Belanja Pegawai	552.847.881.367,47	500.121.542.451,11	91,55	(46.726.338.916,36)	
2.1.2	Belanja Bunga	140.000.000,00	120.031.476,00	85,76	(23.968.523,11)	
2.1.3	Belanja Subsidi	10.058.273.700,00	10.042.470.514,00	99,84	(15.803.182,00)	
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	56.901.857.739,00	45.390.060.504,50	79,77	(11.511.797.144,50)	
2.4.1.1	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20.173.017.145,59	20.173.017.145,50	100,00	(0,09)	
2.4.1.2	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	17.346.150.000,00	16.981.721.450,00	95,78	(364.428.550,00)	
2.1.5	Belanja Tidak Terduga	8.151.971.032,00	306.297.000,00	3,74	(7.844.774.032,00)	
2.2	Belanja Langsung	385.046.179.566,06	307.483.849.775,00	79,86	(77.562.329.791,00)	
2.1.1.1	Belanja Pegawai	90.391.537.316,00	80.195.794.025,00	88,72	(10.195.783.511,00)	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	152.378.308.425,00	128.893.965.721,00	84,59	(23.484.342.704,00)	
2.2	Belanja Modal	142.276.333.005,00	98.394.135.029,00	69,16	(43.882.198.576,00)	

URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
3	PEMBAYARAN					
3.1	PENERIMAAN DAERAH					
3.1.1	Sisa Lebih Hitungan Anggaran Th Sebelumnya	195.763.465.158,06	195.763.465.158,00	100,00	0,00	
3.1.2	Penerimaan Pajak Bencana	0,00	294.488.800,00	0,00	294.488.800,00	
	Jumlah	195.763.465.158,06	196.057.953.958,06	100,15	294.488.800,00	
3.2	Pengeluaran Daerah					
3.2.1	Pembayaran Modal (Investasi) Daerah	13.475.000.000,00	13.475.000.000,00	100,00	0,00	
3.2.2	Pembayaran Pokok Utang	2.138.000.000,00	2.137.244.928,10	99,99	(255.071,60)	
3.2.3	Pembayaran Pinjaman Daerah	6.100.000.000,00	6.100.000.000,00	100,00	0,00	
3.2.4	Pembayaran PPh 21	2.448.490.666,00	0,00	0,00	(2.408.490.666,00)	
3.2.5	Pembayaran Hutang Pajak Bencana	294.488.800,00	294.488.800,00	100,00	0,00	
3.2.6	JPKM	4.615.237.529,00	0,00	0,00	(4.615.237.529,00)	
	Jumlah	29.231.216.995,00	22.007.233.728,10	75,29	(7.223.983.266,60)	
	Pembayaran Netto	166.532.248.163,06	174.050.720.229,66	104,51	7.518.472.066,60	
SILPA		0,00	213.907.757.911,50			



LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SLEMAN
 NOMOR: 17 Tahun 2010
 TANGGAL: 28 Juli 2010

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2009
 (SEBELUM KONVERSI)
 (AUDITAN)

(dalam rupiah)

NO. RUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		LEBIH / (KURANG)	KET.
			Rp	%		
1	2	3	4	5	6	7
1	PENDAPATAN	955,033,225,051.99	996,192,714,691.84	104.31	41,149,489,639.85	
1.1	Pendapatan Asli Daerah	128,918,153,263.99	157,231,267,811.84	121.96	28,313,114,547.85	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	56,350,000,000.00	71,044,731,106.66	126.08	14,694,731,106.66	
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	49,556,793,680.00	54,719,438,555.90	110.42	5,162,644,875.90	
1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	9,839,600,803.99	9,973,164,266.92	101.36	133,563,462.93	
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	13,171,758,780.00	21,493,933,882.36	163.18	8,322,175,102.36	
1.2	Dana Perimbangan	724,463,105,588.00	717,703,169,280.00	99.07	(6,759,936,308.00)	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	100,629,327,588.00	93,869,391,280.00	93.28	(6,759,936,308.00)	
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	587,857,778,000.00	587,857,778,000.00	100.00	0.00	
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	35,976,000,000.00	35,976,000,000.00	100.00	0.00	
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	101,651,966,200.00	121,248,277,600.00	119.28	19,596,311,400.00	
1.3.1	Pentapatan Hibah	1,020,770,000.00	120,770,000.00	11.83	(900,000,000.00)	
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	68,062,048,800.00	68,062,049,000.00	100.00	200.00	
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	16,492,700,000.00	16,492,000,000.00	100.00	0.00	
1.3.4	Dana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau	1,182,700,400.00	1,285,611,600.00	108.70	102,911,200.00	
1.3.5	Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal dan Percepatan Pembangunan Daerah	14,864,447,000.00	14,864,447,000.00	100.00	0.00	
1.3.6	Tunjangan Pendidikan	0.00	20,393,400,000.00	0.00	20,393,400,000.00	
2	BELANJA	1,139,002,482,963.58	1,016,026,601,135.37	89.20	(122,975,881,828.21)	
2.1	Belanja Tidak Langsung	738,515,507,832.57	672,286,269,326.73	91.03	(66,229,238,505.84)	
2.1.1	Belanja Pegawai	599,880,207,667.00	556,313,654,100.82	92.72	(43,566,553,566.18)	
2.1.2	Belanja Bunga	144,000,000.00	102,458,156.61	71.15	(41,541,843.39)	
2.1.3	Belanja Subsidi	10,800,000,000.00	10,189,618,480.00	94.35	(610,381,520.00)	
2.1.4	Belanja Hibah	19,411,418,350.00	19,401,387,158.00	99.95	(10,031,192.00)	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	59,779,802,439.00	46,289,247,223.30	77.43	(13,490,555,215.70)	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20,523,769,067.40	20,517,574,208.00	99.97	(6,194,859.40)	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	21,466,635,000.00	19,472,130,000.00	90.71	(1,994,505,000.00)	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	6,409,675,309.17	0.00	0.00	(6,409,675,309.17)	
2.2	Belanja Langsung	400,486,975,131.01	343,740,331,808.64	85.83	(56,746,643,322.37)	
2.2.1	Belanja Pegawai	89,880,838,912.00	80,293,674,749.00	89.33	(9,587,164,163.00)	
2.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	173,626,240,022.00	147,599,744,504.64	85.01	(26,026,495,517.36)	
2.2	Belanja Modal	136,979,896,197.01	115,846,912,555.00	84.57	(21,132,983,642.01)	
	Surplus/(Defisit)	(183,969,257,911.59)	(19,843,886,443.53)	10.79	164,125,371,468.06	

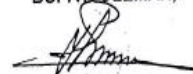
LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI
NOMOR 27 TAHUN 2011
TANGGAL 8 Agustus 2011

PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2010
(SEBELUM KONVERSI)
(AUDITAN)

(dalam rupiah)

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN		REALISASI	KEBILANGAN	KESELURUHAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			
1	PENDAPATAN	1.096.899.222.057,99	1.095.628.887.559,93	99,88		(1.270.334.498,06)
1.1	Pendapatan Asli Daerah	163.630.209.690,15	163.056.459.137,93	99,71		(473.750.552,22)
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75.969.096.600,00	80.611.542.955,52	106,11		4.642.446.355,52
1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	58.973.721.680,00	59.110.503.292,07	100,23		136.781.612,07
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.448.161.337,99	10.169.824.623,38	97,34		(278.336.714,61)
1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	18.139.230.072,16	13.164.538.266,96	72,58		(4.974.641.805,20)
1.2	Dana Perimbangan	737.807.079.540,00	740.198.028.398,00	100,32		2.390.948.858,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	104.638.887.540,00	107.029.836.398,00	102,28		2.390.948.858,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum	563.320.892.000,00	563.320.892.000,00	100,00		0,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	69.847.300.000,00	69.847.300.000,00	100,00		0,00
1.3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	195.561.932.827,84	192.374.400.024,00	98,37		(3.187.532.803,84)
1.3.1	Pendapatan Hibah	22.163.080.000,00	20.785.299.550,00	93,78		(1.377.780.450,00)
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	73.863.363.827,84	73.868.806.474,00	100,01		5.422.646,16
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Prov. Atau Pemda Lainnya	11.367.000.000,00	11.367.000.000,00	100,00		0,00
1.3.4	Dana Tunjangan Pendidikan	88.168.469.000,00	84.453.294.000,00	96,01		(1.715.175.000,00)
1.3.5	DPIPP	1.000.000.000,00	900.000.000,00	90,00		(100.000.000,00)
1.3.6	DPIPD	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00		0,00
2	BELANJA	1.244.286.348.597,65	1.131.602.398.904,14	90,94		(112.683.949.693,51)
2.1	Belanja Tidak Langsung	826.537.234.022,65	782.307.301.323,83	94,65		(44.229.932.698,82)
2.1.1	Belanja Pegawai	726.295.742.307,49	688.994.947.281,52	94,66		(37.300.795.025,97)
2.1.2	Belanja Bunga	144.000.000,00	77.980.369,31	54,15		(66.019.630,69)
2.1.4	Belanja Hibah	20.280.011.487,00	18.413.622.487,00	90,80		(1.866.389.000,00)
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	35.183.302.725,00	32.161.755.577,00	91,41		(3.021.547.148,00)
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	19.528.558.295,24	19.528.558.295,00	100,00		(0,24)
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kab./Kota & Pemerintah Desa	20.701.460.733,00	18.726.347.000,00	90,46		(1.975.113.733,00)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.404.158.474,92	4.404.090.314,00	100,00		(68.160,92)
2.2	Belanja Langsung	417.749.114.575,00	349.295.097.580,31	83,61		(68.454.016.994,69)
2.2.1	Belanja Pegawai	75.213.856.468,00	66.843.296.573,42	88,87		(8.370.559.892,58)
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	215.743.125.709,00	182.639.531.636,08	84,66		(33.103.594.072,92)
2.2	Belanja Modal	126.792.132.400,00	99.812.269.370,81	78,72		(26.979.863.029,19)
	Surplus/(Defisit)	(147.387.126.539,66)	(35.973.511.344,21)	24,41		111.413.615.195,45
3	PEMBIAYAAN					
3.1	Penerimaan Pembiayaan SILPA	164.125.628.539,66	164.125.628.539,66	100,00		0,00
3.1.1	Jumlah	164.125.628.539,66	164.125.628.539,66	100,00		0,00
3.2	Pengeluaran Pembiayaan					
3.2.2	Penyertaan Modal	10.500.000.000,00	10.500.000.000,00	100,00		0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	138.000.000,00	137.744.928,40	99,82		(255.071,60)
3.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah (Penguatan Modal)	6.100.500.000,00	6.100.500.000,00	100,00		0,00
	Jumlah	16.738.500.000,00	16.738.244.928,40	100,00		(255.071,60)
	Pembiayaan Netto	147.387.126.539,66	147.387.381.611,26	100,00		255.071,60
	SILPA Tahun Berkenaan	0,00	111.413.870.267,05			

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp.)		Bertambah / (Berkurang)	
		Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Rp.	%
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan asli daerah	35.344.379.551,00	38.637.833.503,34	3.293.453.952,34	9,32
1.1.1	Pajak Daerah	3.148.025.000,00	3.366.877.168,76	218.852.168,76	6,95
1.1.2	Retribusi Daerah	20.585.388.800,00	22.355.637.683,00	1.770.248.883,00	8,60
1.1.3	Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	4.331.533.869,00	3.805.164.956,58	(526.368.912,42)	(12,15)
1.1.4	Lain-Lain pendapatan asli daerah yang sah	7.279.431.882,00	9.110.153.695,00	1.830.721.813,00	25,15
1.2	Dana Perimbangan	435.659.798.746,00	441.229.946.509,37	5.570.147.763,37	1,28
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	18.780.798.746,00	20.928.278.545,37	2.147.479.799,37	11,43
1.2.2	Dana Alokasi Umum	374.760.000.000,00	378.145.129.800,00	3.385.129.800,00	0,90
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	42.119.000.000,00	42.156.538.164,00	37.538.164,00	0,09
.....	Dana Penyesuaian				
1.3	Lain-lain Pendapatan daerah yang Sah	35.703.442.300,00	43.070.033.597,95	7.366.591.297,95	20,63
1.3.1	Hibah	275.130.000,00	107.110.000,00	(168.020.000,00)	(61,07)
1.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah daerah lainnya -	15.928.312.300,00	17.531.209.200,00	1.602.896.900,00	10,06
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	13.500.000.000,00	12.150.000.000,00	(1.350.000.000,00)	(10,00)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	6.000.000.000,00	11.800.000.000,00	5.800.000.000,00	96,67
	Lain-lain	0,00	-1.481.714.397,95	1.481.714.397,95	0,00
	Jumlah Pendapatan	506.707.620.597,00	522.937.813.610,66	16.230.193.013,66	3,20
2.	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	308.951.863.546,00	293.463.109.279,71	15.488.754.266,29	5,01
2.1.1	Belanja Pegawai	274.230.911.715,00	261.756.129.452,37	12.474.782.262,63	4,55
2.1.2	Belanja Bunga	108.000.000,00	95.258.147,34	12.741.852,66	11,80
2.1.3	Belanja Subsidi	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	1.229.500.000,00	1.229.500.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	7.997.000.000,00	7.573.782.525,00	423.217.475,00	5,29
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	690.463.400,00	690.463.400,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.241.682.945,00	21.730.977.755,00	510.705.190,00	2,30
2.1.8	Belanja Tak Terduga	2.284.305.486,00	216.998.000,00	2.067.307.486,00	90,50
2.2	Belanja Langsung	228.698.081.852,00	199.376.997.814,00	29.321.084.038,00	12,82
2.2.1	Belanja Pegawai	34.836.209.975,00	31.044.706.520,00	3.791.503.455,00	10,88
2.2.2	Belanja barang dan jasa	82.079.186.397,00	74.605.437.192,00	7.473.749.205,00	9,11
2.2.3	Belanja Modal	111.782.685.480,00	93.726.854.102,00	18.055.831.378,00	16,15
	Jumlah Belanja	537.649.945.398,00	492.840.107.093,71	44.809.838.304,29	8,33
	Surplus / (Defisit)	(30.942.324.801,00)	30.097.706.516,95	(61.040.031.317,95)	

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

KODE KENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	PENDAPATAN DAERAH	577.457.154.376,00	581.934.155.009,44	4.477.000.633,44	100,78
	Pendapatan Asli Daerah	39.736.227.720,00	42.289.208.475,81	2.552.980.756,81	106,42
	Hasil Pajak Daerah	3.662.426.400,00	3.709.445.560,79	47.019.160,79	101,28
	Hasil Retribusi Daerah	25.159.689.963,00	26.704.708.328,00	1.545.018.365,00	106,14
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.158.138.332,00	4.608.710.291,92	(550.428.040,08)	89,33
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.754.973.025,00	7.266.344.298,10	1.511.371.273,10	126,28
	Dana Perimbangan				
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	477.478.289.321,00	478.584.755.956,63	1.106.466.635,63	100,23
	Dana Alokasi Umum	21.683.509.321,00	22.789.972.956,63	1.106.463.635,63	105,10
	Dana Alokasi Khusus	403.658.780.000,00	403.658.783.000,00	3.000,00	100,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.138.000.000,00	52.138.000.000,00	0,00	100,00
	60.242.637.335,00	61.060.190.576,00	817.553.241,00	101,36	
	Pendapatan Hibah	17.489.371.835,00	17.595.323.199,00	105.951.364,00	100,61
	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	21.665.089.500,00	21.665.089.500,00	0,00	100,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	9.472.976.000,00	9.420.491.400,00	(52.484.600,00)	99,45
	Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerah lainnya	11.615.200.000,00	11.615.200.000,00	0,00	100,00
	Lain-lain	0,00	764.086.477,00	764.086.477,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	577.457.154.376,00	581.934.155.009,44	4.477.000.633,44	
	BELANJA DAERAH	626.369.590.535,65	598.059.933.717,75	(28.309.678.817,90)	95,48
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	389.921.248.406,65	382.926.557.673,75	(6.994.690.732,90)	98,21
	Belanja Pegawai	330.798.507.985,65	326.127.818.417,00	(4.670.689.568,65)	98,59
	Belanja Bunga	108.000.000,00	84.513.624,75	(23.486.375,25)	78,33
	Belanja Subsidi	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00	100,00
	Belanja Hibah	15.906.185.000,00	15.705.485.000,00	(140.700.000,00)	99,12
	Belanja Bantuan Sosial	13.801.256.350,00	12.988.618.575,00	(802.637.775,00)	94,18
	Belanja (bagi) Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.207.824.100,00	1.207.824.100,00	0,00	100,00
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	25.970.419.545,00	25.013.629.545,00	(956.790.000,00)	96,83
	Belanja Tidak Terduga	1.989.055.426,00	990.493.412,00	(998.562.014,00)	49,80
	BELANJA LANGSUNG	236.448.342.129,00	215.131.354.044,00	(21.316.988.085,00)	90,98
	BELANJA PEGAWAI	41.329.528.056,00	38.783.531.064,00	(2.545.996.992,00)	93,84
	BELANJA BARANG DAN JASA	95.059.469.053,00	84.050.904.253,00	(10.408.474.800,00)	89,05
	BELANJA MODAL	100.059.345.020,00	91.696.828.727,00	(8.362.516.293,00)	91,64
	JUMLAH BELANJA	626.369.590.535,65	598.059.933.717,75	(28.309.678.817,90)	95,48
	SURPLUS (DEFISIT)	(48.912.436.159,65)	(16.125.778.708,31)	(32.786.657.451,34)	0,00
	PEMBIAYAAN (DARI RAH)	48.912.436.159,65	46.140.741.727,85	(2.771.694.431,80)	94,33
	Penerimaan Pembiayaan Daerah	61.589.819.359,65	58.817.512.212,65	(2.772.307.147,00)	95,50
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	55.391.982.929,65	55.391.982.929,65	0,00	100,00
	Penerimaan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penerimaan piutang daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	61.589.819.359,65	58.817.512.212,65	(2.772.307.147,00)	95,27
	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	12.677.383.200,00	12.676.770.484,80	(612.715,20)	100,00
	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	7.542.000.000,00	7.542.000.000,00	0,00	100,00
	Pembayaran Pokok Utang	92.000.000,00	91.387.284,80	(612.715,20)	99,33
	Pemberian Pinjaman Daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	100,00
	Penyelesaian Kegiatan DPA-L	4.043.383.200,00	4.043.383.200,00	0,00	100,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Anggaran Berjalan	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	12.677.383.200,00	12.676.770.484,80	(612.715,20)	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	48.912.436.159,65	46.140.741.727,85	(2.771.694.431,80)	(5,67)
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkecuan (SILPA)	0,00	30.014.963.019,54	30.014.963.019,54	0,00

SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
Ka. Bag. HUKUM SETDA KABUPATEN
KULON PROGO



Lampiran 1 : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 45 Tahun 2010
 Tanggal : 14 September 2010

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2009

KODE BIBIKING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	575.293.163.458,37	596.428.928.201,19	21.135.774.742,82	103,67
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	44.673.862.772,37	39.356.629.412,10	(5.315.233.360,27)	88,10
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	3.826.358.900,00	3.549.894.568,86	(276.464.331,14)	92,77
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.896.037.482,00	5.918.692.238,41	(2.977.345.243,59)	66,54
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.919.579.940,57	5.208.953.134,31	(710.626.806,26)	88,00
4.2	Dana Perimbangan	29.030.886.449,80	24.661.088.470,52	(4.369.898.979,28)	85,02
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	493.939.110.486,00	494.268.843.933,00	329.733.447,00	100,07
4.2.2	Dana Alokasi Umum	24.458.468.486,00	24.788.201.933,00	329.733.447,00	101,35
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	413.081.642.000,00	413.081.642.000,00	0,00	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG BAH	56.399.000.000,00	56.399.000.000,00	0,00	100,00
4.3.1	Pendapatan Hibah	38.880.180.200,00	62.801.454.856,09	23.921.274.656,09	171,21
4.3.2	Dana Darurat	1.402.815.000,00	13.035.824.000,00	11.633.009.000,00	929,26
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	21.644.186.200,00	21.644.186.200,00	0,00	100,00
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	1.297.179.000,00	15.808.541.000,00	14.511.362.000,00	1.231,76
	Lain-lain	12.388.000.000,00	12.366.000.000,00	(22.000.000,00)	100,00
		0,00	146.903.656,09	146.903.656,09	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	575.293.163.458,37	596.428.928.201,19	21.135.774.742,82	103,67
5	BELANJA DAERAH				
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	602.914.405.863,00	577.736.996.100,47	(25.177.409.762,53)	95,82
5.1.1	Belanja Pegawai	457.581.510.986,00	444.766.627.124,47	(12.814.883.861,53)	97,20
5.1.2	Belanja Bunga	384.964.212.794,00	373.009.926.556,00	(11.954.286.148,00)	96,89
5.1.3	Belanja Subsidi	78.964.171,62	73.480.857,47	(5.473.314,15)	93,07
5.1.4	Belanja Hibah	140.000.000,00	122.260.000,00	(17.740.000,00)	87,33
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	42.016.651.800,00	41.711.851.796,00	(304.800.004,00)	99,27
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	7.286.336.600,00	7.006.025.838,00	(280.310.762,00)	96,42
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.180.812.800,00	1.178.075.077,00	(2.737.723,00)	99,77
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	21.252.930.000,00	21.252.930.000,00	0,00	100,00
5.2	BELANJA LANGSUNG	681.612.910,38	412.077.000,00	(269.535.910,38)	60,46
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	145.332.894.877,00	132.970.368.976,00	(12.362.525.901,00)	91,49
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	32.386.322.108,00	29.155.721.815,00	(3.230.600.293,00)	90,02
5.2.3	BELANJA MODAL	68.504.390.347,00	63.004.170.636,00	(5.500.219.711,00)	91,97
	JUMLAH BELANJA	44.442.182.422,00	40.810.476.525,00	(3.631.705.897,00)	91,83
	SURPLUS (DEFISIT)	602.914.405.863,00	577.736.996.100,47	(25.177.409.762,53)	95,82
6	PEMBIAYAAN DAERAH	(27.621.252.404,63)	18.691.932.100,72	(4.041.635.019,71)	(67,67)
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	27.621.252.404,63	26.677.363.613,74	(2.771.694.431,60)	96,58
6.1.1	Sisa Lebih Pembagian Anggaran Tahun Sebelumnya	35.740.022.831,43	34.141.233.434,54	(1.598.789.396,89)	95,53
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	30.014.963.019,43	30.014.963.019,54	(0,11)	100,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	5.725.059.812,00	4.126.270.415,00	(1.598.789.397,00)	72,07
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	35.740.022.831,43	34.141.233.434,54	(1.598.789.396,89)	95,53
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	8.118.770.426,80	7.463.869.820,80	(654.900.606,00)	91,93
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	4.652.000.000,00	3.552.000.000,00	(1.100.000.000,00)	76,35
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	3.466.770.426,80	2.811.869.820,80	(654.900.606,00)	81,11
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	0,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTO	8.118.770.426,80	7.463.869.820,80	(654.900.606,00)	91,93
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	27.621.252.404,63	26.677.363.613,74	(943.888.790,89)	96,58
		0,00	45.369.295.714,46	0,00	0,00

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
 SALINAN TELAH SESUAI DENGAN ASLINYA
 K. H. HUKUM SETDA KABUPATEN
 KULON PROGO
 SEKRETARIAT DAERAH

Wakil Bupati
 BUPATI KULON PROGO
 H. TOYO GOSDIPO
 KULON PROGO

Lampiran 1 : PERATURAN BUPATI
 Nomor : 47 Tahun 2011
 Tanggal : 1 Agustus 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
 RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2010

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERTAMBAH / (BERKURANG)	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN DAERAH	628.327.760.517,95	633.088.918.846,16	4.761.158.328,21	100,76
4.1	Pendapatan Asli Daerah	45.501.872.652,01	48.280.640.675,16	2.778.768.023,15	106,11
4.1.1	Hasil Pajak Daerah	4.019.852.393,30	4.310.294.480,42	290.442.087,12	107,23
4.1.2	Hasil Retribusi Daerah	7.590.100.720,00	7.727.597.309,00	137.406.589,00	101,81
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.785.876.909,61	4.740.517.850,30	(45.359.059,31)	99,05
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	29.106.042.629,10	31.502.321.036,44	2.396.278.407,34	108,23
4.2	Dana Perimbangan	482.234.668.793,00	489.094.126.372,00	2.859.456.579,00	100,59
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	29.326.950.793,00	32.186.407.372,00	2.859.456.579,00	109,75
4.2.2	Dana Alokasi Umum	411.293.618.000,00	411.293.618.000,00	0,00	100,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	41.614.100.000,00	41.614.100.000,00	0,00	100,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	100.591.219.072,94	99.714.152.799,00	(877.066.273,94)	99,13
4.3.1	Pendapatan Hibah	9.982.282.500,00	9.920.409.525,00	(1.061.872.975,00)	89,36
4.3.2	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dan Provinsi	23.894.222.172,94	23.776.478.874,00	(117.743.299,94)	99,51
4.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	57.314.714.400,00	57.617.264.400,00	302.550.000,00	100,53
4.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.400.000.000,00	9.400.000.000,00	0,00	100,00
	JUMLAH PENDAPATAN	628.327.760.517,95	633.088.918.846,16	4.761.158.328,21	100,76
5	BELANJA DAERAH	671.777.395.593,00	612.902.631.166,54	(58.874.764.426,46)	91,24
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	494.849.584.619,00	473.959.862.626,54	(20.889.701.992,46)	95,78
5.1.1	Belanja Pegawai	454.359.635.978,07	434.822.712.038,00	(18.537.223.943,07)	95,92
5.1.2	Belanja Bunga	78.954.171,62	62.578.712,54	(16.375.459,06)	79,26
5.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.4	Belanja Hibah	8.301.280.000,00	8.043.896.075,00	(257.383.925,00)	96,90
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.185.857.500,00	8.000.501.446,00	(1.185.356.054,00)	87,10
5.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.229.102.027,00	1.972.846.161,00	743.744.134,00	160,51
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	20.740.108.225,89	19.896.533.697,00	(843.574.528,89)	95,93
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	964.346.716,42	160.814.500,00	(793.532.216,42)	16,85
5.2	BELANJA LANGSUNG	176.927.810.974,00	138.942.748.540,00	(37.985.062.434,00)	78,53
5.2.1	BELANJA PEGAWAI	29.540.472.629,00	25.665.997.321,00	(3.874.475.308,00)	86,88
5.2.2	BELANJA BARANG DAN JASA	75.196.168.027,00	66.894.662.325,00	(8.301.505.702,00)	88,73
5.2.3	BELANJA MODAL	72.221.170.318,00	46.582.088.894,00	(25.639.081.424,00)	64,50
	JUMLAH BELANJA	671.777.395.593,00	612.902.631.166,54	(58.874.764.426,46)	91,24
	SURPLUS (DEFISIT)	(43.449.635.075,05)	20.186.287.679,62	63.635.922.754,67	(46,46)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	43.449.635.075,05	42.504.590.874,66	(2.771.804.431,80)	97,82
6.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	48.443.022.359,85	47.497.978.159,46	(945.044.200,39)	98,05
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya	45.369.295.714,46	45.369.295.714,46	0,00	100,00
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	3.073.726.645,39	2.128.682.445,00	(945.044.200,39)	69,25
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENERIMAAN	48.443.022.359,85	47.497.978.159,46	(945.044.200,39)	98,05
6.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.993.387.284,80	4.993.387.284,80	0,00	100,00
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.902.000.000,00	4.902.000.000,00	0,00	100,00
6.2.3	Pembayaran Pokok Utang	91.387.284,80	91.387.284,80	0,00	100,00
6.2.4	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN PENGELUARAN	4.993.387.284,80	4.993.387.284,80	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	43.449.635.075,05	42.504.590.874,66	(945.044.200,39)	97,82
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	62.690.878.554,28	62.690.878.554,28	0,00

Salinan Telah Sesuai Dengan Aslinya
 An. Ka. Dap. Monev P. dan P. B. Kulon Progo
 Ka. Sisd. dan P. dan P. dan P. dan P. dan P.
 Sosial dan P. dan P. dan P. dan P. dan P.



PEMANGKULON

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2007	BERLEBIH / (BERKURANG)	%	REALISASI 2006
1.	PENDAPATAN					
1.1	Pendapatan Asli Daerah					
1.1.1	Hasil Pajak Daerah	3.973.859.750,00	5.105.382.324,00	1.131.522.574,00	128,47	3.389.590.508,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.919.825.560,00	15.093.480.315,00	1.173.654.755,00	106,43	18.327.422.191,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.700.000.000,00	2.401.288.012,56	701.288.012,56	141,25	1.608.249.564,82
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	2.634.862.000,00	6.278.205.894,59	3.643.323.894,59	238,27	6.475.373.984,85
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	22.228.567.310,00	28.878.356.646,15	6.649.789.236,15	129,92	29.801.036.248,67
1.2	Dana Perimbangan					
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	20.245.184.156,00	23.316.204.134,00	3.071.019.978,00	115,17	20.190.468.913,00
	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	454.545.454,00	308.712.307,00	(145.833.147,00)	67,92	308.188.080,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	459.851.000,00	465.243.563,40	5.392.563,40	101,17	432.868.000,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	49.167.000,00	49.167.000,00	0,00	100,00	29.080.000,00
	Jumlah Dana Perimbangan	529.717.729.610,00	538.035.469.841,00	8.317.740.231,00	101,57	482.446.366.993,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah					
1.3.1	Pendapatan Hibah	0,00	500.000,00	500.000,00		0,00
1.3.2	Dana Darurat	0,00	1.144.049.949,00	1.144.049.949,00		0,00
1.3.3	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	18.989.098.300,00	21.412.248.700,00	4.423.148.400,00	126,04	14.075.011.296,46
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Propinsi	8.000.000,00	13.175.000,00	5.175.000,00	164,69	0,00
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00		1.029.813.790,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.989.098.300,00	35.731.796.649,00	10.742.698.349,00	142,99	15.104.825.086,46
	JUMLAH PENDAPATAN	576.935.395.220,00	602.645.623.036,15	25.710.227.816,15	104,46	527.352.228.328,13
2.	BELANJA DAERAH					
2.1	Belanja Tidak Langsung					
2.1.1	Belanja Pegawai	304.033.049.460,79	284.689.366.250,20	(19.343.681.210,59)	93,64	253.063.166.895,27
2.1.2	Biaya Bunga	77.000,00	76.390.552,14	(609.447,86)	99,21	84.649.601,75
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	22.386.031.000,00	26.840.848.150,00	4.454.818.150,00	119,90	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	2.381.000,00	2.361.334.033,00	(19.671.167,00)	99,17	483.766.891,03
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemintah Desa	28.196.400,00	27.033.190,00	(1.163.210,00)	95,87	41.184.331.867,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	4.816.556.462,73	1.856.345.000,00	(2.960.211.462,73)	38,54	4.751.095.000,00
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	361.880.042.123,52	342.957.476.985,34	(18.922.565.138,18)	94,74	299.577.010.255,05

NOMOR	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2007	BERLEBIH / BERKURANG	%	REALISASI 2006
2.2	Belanja Langsung	41.968.128.000,00	37.364.255.092,00	(4.593.873.708,00)	89,05	12.640.830.965,00
2.2.1	Belanja Pegawai	92.654.201.547,50	77.890.055.599,00	(14.764.145.948,50)	84,07	76.301.286.477,25
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	130.305.193.030,00	117.571.963.689,00	(12.733.229.341,00)	90,23	115.105.478.337,00
2.2.3	Belanja Modal	264.917.523.377,50	232.826.274.380,00	(32.091.248.997,50)	87,89	204.047.595.810,25
	Jumlah: Belanja Langsung	626.807.565.501,02	575.693.751.365,34	(51.123.814.135,68)	182,63	503.624.606.065,30
	JUMLAH BELANJA					
	Surplus/ (Defisit)	(49.872.170.281,02)	26.561.871.670,81	76.834.041.951,83	(78,17)	23.727.622.262,83
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	Penerimaan Pembiayaan					
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	48.303.272.191,02	48.303.272.190,77	(0,25)	100,00	29.674.726.638,20
3.1.1.1	Penerimaan Kembali Pembenan Pinjaman	3.968.225.000,00	3.888.426.450,00	(79.798.550,00)	97,99	0,00
3.1.1.5	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	52.271.497.191,02	52.191.698.640,77	(79.798.550,25)	197,99	29.674.726.638,20
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.330.000.000,00	2.330.000.000,00	0,00	100,00	5.000.000.000,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	69.326.910,00	69.326.910,00	0,00	100,00	99.076.910,26
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	2.399.326.510,00	2.399.326.910,00	0,00	100,00	5.099.076.910,26
	Jumlah Pembiayaan Neto	49.872.170.281,02	49.792.371.730,77	(79.798.550,25)	99,84	24.575.649.927,94
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	0,00	76.754.243.401,58	76.754.243.401,58		48.303.272.190,77

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2008

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	BEREBIH / (BERKURANG)	%
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				11,67
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	4.915.950.000,00	5.489.806.439,00	573.856.439,00	8,95
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	15.852.010.200,00	17.270.848.448,00	1.418.838.248,00	1,09
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2.680.000.000,00	2.709.220.759,13	29.220.759,13	55,37
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	4.787.093.000,00	7.437.739.049,84	2.650.646.049,84	16,55
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	28.235.053.200,00	32.907.614.695,97	4.672.561.495,97	
1.2.	Dana Perimbangan				15,91
1.2.1.	Dana Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	22.422.520.868,00	25.989.138.193,77	3.566.617.325,77	0,00
1.2.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	353.429.220,00	169.940.281,00	(184.488.939,00)	0,00
1.2.3.	Dana Alokasi Umum	504.395.750.000,00	504.395.748.000,00	(2.000,00)	0,00
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus	60.879.000.000,00	60.879.000.000,00	0,00	0,59
**	Jumlah Dana Perimbangan	588.050.700.088,00	591.432.826.474,77	3.382.126.386,77	
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				0,00
1.3.1.	Pendapatan Hibah	18.024.181.000,00	18.024.181.000,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	145.043.925,00	145.043.925,00	0,00
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	23.103.074.100,00	23.103.074.100,00	0,00	(0,32)
1.3.4.	Dana Penyesuaian	5.618.517.400,00	5.618.516.398,00	(1.002,00)	0,00
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	17.081.600.000,00	17.027.600.000,00	(54.000.000,00)	0,14
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	1,20
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	63.827.372.500,00	63.918.415.424,00	91.042.924,00	
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	680.113.125.788,00	688.258.856.594,74	8.145.730.806,74	
2	BELANJA DAERAH				(4,25)
2.1.	Belanja Tidak Langsung	749.140.542.279,58	717.302.227.232,29	(31.838.315.047,29)	(0,69)
2.1.1.	Belanja Pegawai	452.399.289.773,58	449.265.098.369,29	(3.134.191.404,29)	0,69
2.1.2.	Biaya Bunga	370.908.893.482,58	373.465.951.107,75	2.557.057.625,17	(11,27)
2.1.4.	Belanja Hibah	77.000.000,00	68.323.836,54	(8.676.163,46)	0,00
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	415.000.000,00	415.000.000,00	0,00	(5,07)
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial	29.531.335.000,00	28.033.971.500,00	(1.497.363.500,00)	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	JUMLAH REALISASI	BERLEBIH / (BERKURANG)	%
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	2.930.785.520,00	2.930.784.000,00	(1.520,00)	(0,00)
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	42.242.850.000,00	40.886.694.300,00	(1.356.165.700,00)	(3,21)
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	6.293.425.771,00	3.464.383.625,00	(2.829.042.146,00)	(44,95)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	452.399.289.773,58	449.265.098.369,29	(3.134.191.404,29)	(0,69)
2.2.	Belanja Langsung	296.741.252.506,00	268.037.128.863,00	(28.704.123.643,00)	(9,67)
2.2.1.	Belanja Pegawai	50.041.517.400,00	43.605.627.220,00	(6.435.890.180,00)	(12,86)
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	102.227.970.530,00	86.655.163.569,00	(15.572.806.961,00)	(15,23)
2.2.3.	Belanja Modal	144.471.764.576,00	137.776.338.074,00	(6.695.426.502,00)	(4,63)
	Jumlah Belanja Langsung	296.741.252.506,00	268.037.128.863,00	(28.704.123.643,00)	(9,67)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	749.140.542.279,58	717.302.227.232,29	(31.838.315.047,29)	(4,25)
	Surplus / (Defisit)	(69.027.416.491,58)	(29.043.370.637,55)	39.984.045.854,03	(57,92)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1. ..	Penerimaan Pembiayaan	79.896.743.401,58	79.871.991.201,58	(24.752.200,00)	(0,03)
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.754.243.401,58	76.754.243.401,58	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	3.142.500.000,00	3.117.747.800,00	(24.752.200,00)	(0,79)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	79.896.743.401,58	79.871.991.201,58	(24.752.200,00)	(0,03)
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.869.326.910,00	10.869.326.910,00	0,00	0,00
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	69.326.910,00	69.326.910,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10.869.326.910,00	10.869.326.910,00	0,00	0,00
	Pembayaran Netto	69.027.416.491,58	69.002.664.291,58	(24.752.200,00)	(0,04)
	SILPA	0,00	39.957.654.436,03	39.957.654.436,03	

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		BERLEBIH / BERKURANG	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN DAERAH				
	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Hasil Pajak Daerah	5.724.000.000,00	6.875.766.083,00	1.151.766.083,00	20,12
1.1.1.	Hasil Retribusi Daerah	19.921.523.272,00	21.690.642.795,50	1.769.119.523,50	8,88
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.199.530.878,80	5.200.730.811,18	1.200.132,38	0,02
1.1.3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.391.820.550,00	4.688.266.482,43	(703.554.067,57)	(13,05)
1.1.4.	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	36.236.874.500,80	38.455.406.172,11	2.218.531.671,31	6,12
1.2.	Dana Perimbangan				
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	27.103.889.889,00	29.627.528.722,00	2.523.638.833,00	9,31
1.2.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,00	0,00	0,00	
1.2.3.	Dana Alokasi Umum	508.212.308.000,00	508.212.308.000,00	0,00	0,00
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus	71.523.000.000,00	71.523.000.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Dana Perimbangan	606.839.197.889,00	609.362.836.722,00	2.523.638.833,00	0,42
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1.	Pendapatan Hibah	453.495.000,00	453.495.000,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	23.483.165.100,00	23.483.165.100,00	0,00	0,00
1.3.4.	Dana Penyesuaian	28.982.860.000,00	22.370.625.000,00	(6.492.235.000,00)	(22,49)
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	17.828.000.000,00	17.828.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	70.827.520.100,00	64.135.285.100,00	(6.492.235.000,00)	(9,19)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	713.703.592.489,80	711.953.527.994,11	(1.750.064.495,69)	(0,25)
2	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung				
2.1.1.	Belanja Pegawai	468.534.872.985,83	430.843.722.575,32	(37.691.150.390,51)	(8,04)
2.1.2.	Belanja Bunga	77.000.000,00	59.872.452,00	(17.127.548,00)	(22,24)
2.1.4.	Belanja Hibah	1.441.827.500,00	1.382.413.750,00	(59.413.750,00)	(4,12)
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	26.494.726.600,00	24.754.866.100,00	(1.739.860.500,00)	(6,57)
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	2.975.452.214,00	2.975.452.014,00	(200,00)	(0,00)
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	39.958.960.000,00	38.901.246.250,00	(1.057.713.750,00)	(2,65)
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	2.239.000.000,00	1.127.625.600,00	(1.111.374.400,00)	(49,64)
	Jumlah Belanja Tidak Langsung	541.721.839.279,83	500.045.198.741,32	(41.676.640.538,51)	(7,69)

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH / (BERKURANG)	%
2.2.	Belanja Langsung	35.960.256.125,00	31.387.973.075,00	(4.572.283.050,00)	(12,71)
2.2.1.	Belanja Pegawai	77.487.082.906,00	68.963.385.843,00	(8.523.697.063,00)	(11,00)
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	98.798.703.205,00	93.848.247.301,52	(4.950.455.903,48)	(5,01)
2.2.3.	Belanja Modal	212.246.042.236,00	194.199.606.219,52	(18.046.436.016,48)	(8,50)
	Jumlah Belanja Langsung	753.967.881.515,83	694.244.804.960,84	(59.723.076.554,99)	(7,92)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	(40.264.289.026,03)	17.708.723.033,27	57.973.012.059,30	(143,98)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.957.654.436,03	39.957.654.436,03	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.812.754.000,00	1.477.846.000,00	(334.908.000,00)	(18,48)
	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	29.103.250,00	29.103.250,00	(0,73)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	41.770.408.436,03	41.464.603.686,03	(305.804.750,00)	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	106.119.410,00	106.119.410,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.506.119.410,00	1.506.119.410,00	0,00	0,00
	Pembayaran Netto	40.264.289.026,03	39.968.484.276,03	(305.804.750,00)	(0,76)
	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Berjalan		57.667.207.309,30		

Wonomasari, 25 Agustus 2010
 P. A. Agurtis
 BUPATI GUNUNGKIDUL
 GUNUNGKIDUL
 SUMPENO PUTRO

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH
 NOMOR : 12 Tahun 2011
 TANGGAL: 19 September 2011

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 LAPORAN REALISASI ANGGARAN
 TAHUN ANGGARAN 2010

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	Pendapatan Asli Daerah				
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	6.646.500.000,00	5.948.838.513,00	(697.661.487,00)	(10,50)
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	24.058.383.800,00	25.079.535.222,50	1.021.151.422,50	4,24
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.713.845.346,80	4.731.777.472,02	17.932.125,22	0,38
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.544.331.983,20	6.781.880.181,09	1.237.548.197,89	22,32
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	40.963.061.130,00	42.542.031.388,61	1.578.970.258,61	3,85
1.2.	Dana Perimbangan				
1.2.1.	Bagi Hasil Pajak	34.573.304.646,00	34.689.415.455,00	116.110.809,00	0,34
1.2.2.	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	1.887.901.918,00	135.047.871,00	(1.752.854.047,00)	(92,85)
1.2.3.	Dana Alokasi Umum	521.293.704.000,00	571.293.704.000,00	0,00	0,00
1.2.4.	Dana Alokasi Khusus	77.574.200.000,00	77.574.200.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Dana Perimbangan	635.329.110.564,00	633.692.367.326,00	(1.636.743.238,00)	(0,26)
1.3.	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah				
1.3.1.	Pendapatan Hibah	14.430.360.000,00	14.430.360.000,00	0,00	0,00
1.3.2.	Dana Daurat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	25.627.683.941,56	25.472.391.574,00	(155.292.367,56)	(0,61)
1.3.4.	Dana Penyesuaian	65.034.896.000,00	64.101.596.000,00	(933.300.000,00)	(1,44)
1.3.5.	Bantuan Keuangan dari Propinsi	16.200.000.000,00	16.200.000.000,00	0,00	0,00
1.3.6.	Pendapatan Lainnya	0,00	1.810.129.064,00	1.810.129.064,00	0,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	121.292.939.941,56	122.014.476.638,00	721.536.696,44	0,59
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	797.585.111.635,56	798.248.876.352,61	663.763.717,05	0,08

u

NO URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	BERLEBIH/BERKURANG	%
7	2	3	4	5	6
2	BELANJA DAERAH				
2.1.	Belanja Tidak Langsung	559.722.563.304,30	547.852.086.402,50	(11.870.476.901,80)	(2,12)
2.1.1.	Belanja Pegawai	77.000.000,00	51.613.404,00	(25.386.596,00)	(32,97)
2.1.2.	Belanja Bunga	9.440.108.698,00	9.245.564.065,00	(194.544.633,00)	(2,06)
2.1.4.	Belanja Hibah	20.289.612.250,00	19.859.301.250,00	(430.311.000,00)	(2,12)
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	3.140.002.632,00	3.140.002.632,00	0,00	0,00
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	41.223.790.000,00	39.839.280.018,21	(1.384.509.981,79)	(3,36)
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	1.133.906.414,56	557.187.375,00	(576.719.039,56)	(50,86)
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	635.026.983.298,86	620.645.035.146,71	(14.481.948.152,15)	(2,28)
2.2.	Belanja Langsung				
2.2.1.	Belanja Pegawai	31.351.997.255,00	28.519.519.150,00	(2.832.478.105,00)	(9,03)
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	79.479.545.061,00	69.124.504.229,00	(10.355.040.832,00)	(13,03)
2.2.3.	Belanja Modal	108.902.498.420,00	47.001.128.396,00	(61.901.370.024,00)	(56,84)
	Jumlah Belanja Langsung	219.734.040.736,00	144.645.151.775,00	(75.088.888.961,00)	(34,17)
	JUMLAH BELANJA DAERAH	854.761.024.034,86	766.190.186.921,71	(88.570.837.113,15)	(10,48)
	Surplus / (Defisit)	(57.175.912.399,30)	33.058.688.430,90	90.234.600.830,20	(157,82)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan				
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahu Sebelumnya	57.667.207.309,30	57.667.207.309,30	0,00	0,00
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	1.596.200.000,00	1.640.443.532,00	44.243.532,00	2,77
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	69.263.407.309,30	59.307.650.841,30	(9.955.756.468,00)	(14,37)
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan				
3.2.2.	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.580.200.000,00	1.577.862.500,00	(2.337.500,00)	(0,15)
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	507.294.910,00	507.294.910,00	0,00	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	2.087.494.910,00	2.085.157.410,00	(2.337.500,00)	(0,11)
	Pembayaran Netto	57.175.912.399,30	57.222.493.431,30	46.581.032,00	0,08
	SILPA Tahun Berjalan		90.281.181.862,20	90.281.181.862,20	

Buletin 19 September 2011
 BUPATI GUNUNGGIDUL
 GUNUNGKIDUL

LAPORAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 6 TAHUN 2008
TANGGAL : 10 September 2008



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	595.089.751.971,00	615.648.852.480,31	20.559.100.509,31	103,45
11	Pendapatan Asli Daerah	104.162.882.000,00	114.088.360.942,31	9.935.468.942,31	109,54
111	Pajak daerah	49.274.000.000,00	54.783.202.892,00	5.509.202.892,00	111,18
112	Retribusi Daerah	29.092.692.000,00	29.197.466.013,00	104.774.013,00	100,36
113	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.799.505.000,00	8.783.239.359,78	(16.265.640,22)	99,82
114	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.996.685.000,00	21.334.442.677,53	4.337.757.677,53	125,52
12	DANA PERIMBANGAN	442.088.480.671,00	439.159.224.538,00	(2.929.256.133,00)	100,00
121	Dana Bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	50.258.480.671,00	47.329.224.538,00	(2.929.256.133,00)	99,34
122	Dana Alokasi Umum	365.042.000.000,00	365.042.000.000,00	-	100,00
123	Dana Alokasi Khusus	26.788.000.000,00	26.788.000.000,00	-	100,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	48.838.389.300,00	62.391.277.000,00	13.552.887.700,00	121,78
131	Hibah	4.988.769.000,00	6.288.730.100,00	1.299.961.100,00	126,06
132	Dana Darurat	-	-	-	-
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah kota	43.849.620.300,00	53.184.790.500,00	9.335.170.200,00	121,29
133	Dana Otonomi Khusus dan Dana penyesuaian	-	2.917.756.400,00	2.917.756.400,00	-
	Jumlah Pendapatan	595.089.751.971,00	615.648.852.480,31	20.559.100.509,31	103,45
2	BELANJA	683.281.388.075,00	569.120.372.561,96	(114.161.015.513,04)	83,29
21	BELANJA TIDAK LANGSUNG	400.988.256.599,00	324.993.963.073,96	(75.994.293.525,04)	81,05
211	Belanja Pegawai	313.551.176.304,00	263.728.367.186,00	(49.822.789.118,00)	84,11
212	Belanja Bunga	707.120.555,00	707.120.553,55	-	100,00
213	Belanja Subsidi	307.192.000,00	306.876.000,00	316.000,00	99,90
214	Belanja Hibah	0,00	0,00	-	-
215	Belanja Bantuan Sosial	62.875.796.994,00	57.742.224.630,00	(5.133.572.364,00)	91,76
216	Belanja Bagi Hasil kepada Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	-	-
217	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota dan Pemerintah Desa	0,00	0,00	-	-
218	Belanja Tidak Terduga	23.546.970.746,00	2.554.951.274,41	(20.992.019.471,59)	10,85
22	BELANJA LANGSUNG	282.293.131.476,00	244.126.409.488,00	(38.166.721.988,00)	86,48
221	Belanja Pegawai	79.172.400.934,00	68.476.752.847,00	(10.695.648.087,00)	86,49
222	Belanja Barang dan Jasa	102.454.936.051,00	85.867.280.473,00	(16.787.675.578,00)	83,61
223	Belanja Modal	100.665.794.491,00	89.982.396.168,00	(10.683.398.323,00)	89,39
	Jumlah Belanja	683.281.388.075,00	569.120.372.561,96	(114.161.015.513,04)	
	Surplus/(Defisit)	(86.191.636.104,00)	46.528.479.918,35	134.720.116.022,35	(52,76)

LAPORAN PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 8 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 Agustus 2009



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2008

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH/ (KURANG)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN	696.352.512.005,00	720.252.933.347,72	23.900.421.342,72	103,43
11	Pendapatan Asli Daerah	116.895.236.061,00	132.431.571.514,72	15.536.335.463,72	113,29
111	Pajak daerah	59.343.591.000,00	62.452.770.490,00	3.109.179.490,00	105,24
112	Retribusi Daerah	32.885.227.754,00	34.940.602.210,00	2.055.374.456,00	106,25
113	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.454.823.854,00	8.454.823.854,45	0,45	100,00
114	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	16.211.593.443,00	26.583.374.960,27	10.371.781.517,27	163,98
12	DANA PERIMBANGAN	499.650.133.866,00	504.741.154.863,00	8.326.952.996,00	101,66
121	Dana Bagi hasil pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	56.154.903.866,00	61.245.922.863,00	5.091.018.997,00	91,70
122	Dana Alokasi Umum	411.257.230.000,00	411.257.232.000,00	2000,00	100,00
123	Dana Alokasi Khusus	32.238.000.000,00	32.238.000.000,00	-	100,00
13	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	79.807.142.088,00	83.080.206.970,00	3.273.064.882,00	104,10
131	Hibah	20.332.060.000,00	20.332.060.000,00	-	100,00
132	Dana Darurat	925.274.588,00	962.407.471,00	37.182.883,00	96,14
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi/kabupaten/Kota dan Pemerintah kota	56.645.511.500,00	56.645.511.500,00	-	100,00
133	Dana Otonomi Khusus dan Dana penyesuaian	1.904.296.000,00	5.140.227.999,00	3.235.931.999,00	-
	Jumlah Pendapatan	696.352.512.005,00	720.252.933.347,72	23.900.421.342,72	103,43
2	BELANJA	815.369.220.042,00	698.566.664.120,78	116.802.555.921,22	85,67
21	BELANJA TIDAK LANGSUNG	491.660.890.986,00	415.300.348.549,04	(76.360.542.436,96)	84,47
211	Belanja Pegawai	387.708.293.898,00	342.891.947.474,00	(44.816.346.424,00)	88,44
212	Belanja Bunga	579.027.700,00	579.027.616,04	-	100,00
213	Belanja Subsidi	-	-	-	-
214	Belanja Hibah	28.216.140.900,00	22.180.860.900,00	(6.035.280.000,00)	78,61
215	Belanja Bantuan Sosial	55.960.226.694,00	49.587.684.559,00	(6.372.542.135,00)	88,61
216	Belanja Bagi Hasil kepada Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
217	Belanja Bantuan Keuangan kepada Kota dan Pemerintah Desa	-	-	-	-
218	Belanja Tidak Terduga	19.197.201.794,00	60.828.000,00	19.136.373.794,00	0,32
22	BELANJA LANGSUNG	323.708.329.056,00	283.266.315.571,74	(40.442.013.484,26)	87,51
221	Belanja Pegawai	96.474.067.282,00	85.279.523.295,60	(11.194.543.986,40)	88,40
222	Belanja Barang dan Jasa	109.285.272.225,00	90.700.730.390,14	(18.584.541.834,86)	82,99
223	Belanja Modal	117.948.989.549,00	107.286.061.886,00	(10.662.927.663,00)	90,96
	Jumlah Belanja	815.369.220.042,00	698.566.664.120,78	(116.802.555.921,22)	85,67
	Surplus/(Defisit)	(119.016.708.307,00)	21.686.269.226,94	140.702.977.263,94	(18,22)

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
(AUDITED)
TAHUN ANGGARAN 2009

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
1	PENDAPATAN DAERAH	728.820.780.075,00	749.989.016.366,95	21.168.236.281,95	102,90
1 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	145.446.398.106,00	181.473.838.209,95	16.027.440.103,95	111,02
1 1 1	Pajak Daerah	66.969.000.000,00	71.852.539.011,00	4.883.539.011,00	107,29
1 1 2	Retribusi Daerah	22.158.537.725,00	23.487.748.962,00	1.339.211.237,00	106,04
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	10.159.369.381,00	10.218.454.601,27	59.085.220,27	100,58
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	46.159.491.000,00	55.905.095.635,68	9.745.604.635,68	121,11
1 2	DANA PERIMBANGAN	522.128.489.869,00	517.366.876.957,00	(4.761.612.912,00)	99,09
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	71.292.159.869,00	66.630.546.957,00	(4.761.612.912,00)	93,32
1 2 2	Dana Alokasi Umum	414.345.330.000,00	414.345.330.000,00	-	100,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	36.491.000.000,00	36.491.000.000,00	-	100,00
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	61.245.892.100,00	71.148.301.200,00	9.902.409.100,00	116,17
1 3 1	Hibah	144.825.000,00	144.825.000,00	-	100,00
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	46.059.402.500,00	46.059.402.800,00	300,00	100,00
1 3 4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	929.264.600,00	10.831.673.400,00	9.902.408.800,00	1.165,62
1 3 5	Bantuan Keuangan dan Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	14.112.400.000,00	14.112.400.000,00	-	100,00
	Jumlah Pendapatan	728.820.780.075,00	749.989.016.366,95	21.168.236.281,95	102,90
2	BELANJA DAERAH	860.974.765.851,00	783.851.692.759,66	(77.123.073.091,34)	91,04
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	509.884.774.585,00	474.846.213.225,86	(35.038.561.359,14)	93,13
2 1 1	Belanja Pegawai	399.664.500.318,00	380.394.869.904,00	(19.269.630.414,00)	95,18
2 1 2	Belanja Bunga	459.221.795,00	459.221.794,86	(0,14)	100,00
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	51.671.837.850,00	49.915.246.350,00	(1.756.591.500,00)	96,60
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	45.130.701.000,00	42.312.581.054,00	(2.818.119.946,00)	93,76
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Kerjasama kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	12.958.513.622,00	1.764.294.123,00	(11.194.219.499,00)	13,61
2 2	BELANJA LANGSUNG	351.089.991.266,00	309.005.479.533,80	(42.084.511.732,20)	88,01
2 2 1	Belanja Pegawai	90.815.588.703,00	80.794.926.619,00	(9.820.662.084,00)	89,16
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	165.888.063.878,00	141.474.807.279,00	(24.413.256.599,00)	85,28
2 2 3	Belanja Modal	94.556.338.685,00	86.735.745.635,80	(7.850.593.049,20)	91,70
	Jumlah Belanja	860.974.765.851,00	783.851.692.759,66	(77.123.073.091,34)	91,04
	Surplus/(Defisit)	(132.153.985.776,00)	(33.862.676.392,71)	98.291.309.383,29	25,62

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	LEBIH/ (KURANG) (Rp)	%
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	143.847.315.073,00	143.752.738.194,54	(94.576.878,46)	99,93
3 1 1	Sisa Lebih Pembagian Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya	143.507.115.073,00	143.502.018.073,54	(5.095.099,46)	99,98
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	100.000.000,00	50.000.000,00	(50.000.000,00)	50,00
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	150.000.000,00	140.700.121,00	(9.299.879,00)	93,80
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	143.847.315.073,00	143.752.738.194,54	(94.576.878,46)	99,93
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	11.693.329.297,00	11.693.328.451,86	(845,14)	100,00
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	-	100,00
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	-	100,00
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	1.193.329.297,00	1.193.328.451,86	(845,14)	100,00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	11.693.329.297,00	11.693.328.451,86	(845,14)	100,00
	Pembiayaan Netto	132.153.985.776,00	132.059.409.742,68	(94.576.033,32)	99,93
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	98.196.733.349,97	98.196.733.349,97	100,00

CATATAN:
SILPA Tahun Anggaran 2009 terdiri dari:
1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2009 sebesar Rp. 89.408.805.073,97
2. SISA KAS RSUD tahun 2009 sebesar Rp. 3.674.099.648,00
3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2009 sebesar Rp. 5.115.827.628,00
Rp. 98.196.733.349,97

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
RINGKASAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010
(AUDITED)

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / (KURANG) (Rp)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
1	PENDAPATAN DAERAH	818.052.316.985	815.495.924.651,51	(2.556.392.333,49)	99,69
1 1	PENDAPATAN ABLI DAERAH	178.872.008.293	179.423.840.087,81	3.881.831.784,81	102,02
1 1 1	Pajak Daerah	78.200.000.000	78.254.879.242,00	3.054.879.242,00	104,08
1 1 2	Retribusi Daerah	29.402.783.000	32.214.000.179,00	2.711.217.179,00	109,23
1 1 3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	11.031.304.700	11.031.304.700,40	0,40	100,00
1 1 4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	80.147.942.593	57.923.105.336,11	(2.224.837.256,89)	96,30
1 2	DANA PERIMBANGAN	492.098.224.251	484.628.282.720,00	(7.469.941.531,00)	98,48
1 2 1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	83.055.662.251	75.585.120.720,00	(7.469.941.531,00)	91,01
1 2 2	Dana Alokasi Umum	395.444.062.000	395.444.062.000,00	-	100,00
1 2 3	Dana Alokasi Khusus	13.599.100.000	13.599.100.000,00	-	100,00
1 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	150.082.084.441	151.444.001.874,00	1.361.917.433,00	100,91
1 3 1	Hibah	12.849.280.000	13.849.280.000,00	1.000.000.000,00	109,49
1 3 2	Dana Darurat	-	-	-	-
1 3 3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah daerah lainnya	48.986.880.441	48.901.022.874,00	(4.142.433,00)	100,01
1 3 4	Dana Penyelesaian dan Otonomi Khusus	81.195.924.000	81.353.698.000,00	157.775.000,00	100,19
1 3 5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah daerah lainnya	7.250.000.000	7.250.000.000,00	-	100,00
	Jumlah Pendapatan	818.052.316.985	815.495.924.651,51	(2.556.392.333,49)	99,69
2	BELANJA DAERAH	917.054.170.180	839.866.480.661,43	(77.187.689.518,57)	91,58
2 1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	558.668.026.872	535.464.145.542,43	(23.203.881.129,57)	95,85
2 1 1	Belanja Pegawai	484.205.172.499	467.904.710.054,00	(16.300.462.445,00)	96,63
2 1 2	Belanja Bunga	554.537.870	379.837.470,43	(174.900.399,57)	68,46
2 1 3	Belanja Subsidi	-	-	-	-
2 1 4	Belanja Hibah	31.026.861.150	30.530.575.535,00	(496.285.615,00)	98,40
2 1 5	Belanja Bantuan Sosial	40.000.495.725	35.339.698.475,00	(4.660.797.250,00)	88,35
2 1 6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	-	-	-	-
2 1 8	Belanja Tidak Terduga	2.880.950.428	1.309.524.008,00	(1.571.435.420,00)	45,45
2 2	BELANJA LANGSUNG	358.386.143.508	304.402.335.119,00	(53.983.808.389,00)	84,94
2 2 1	Belanja Pegawai	100.528.294.020	91.242.263.994,00	(9.286.030.026,00)	90,76
2 2 2	Belanja Barang dan Jasa	182.135.924.939	159.119.838.920,00	(23.016.286.019,00)	87,36
2 2 3	Belanja Modal	75.722.924.549	54.040.432.205,00	(21.681.492.344,00)	71,37
	Jumlah Belanja	917.054.170.180	839.866.480.661,43	(77.187.689.518,57)	91,58
	Surplus/(Defisit)	(99.001.853.195)	(24.370.556.009,92)	74.631.297.185,08	24,62

Halaman 2

NO. URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		LEBIH / (KURANG) (Rp)	%
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI		
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3 1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	100.263.505.350	100.104.878.228,97	(158.627.121,03)	99,84
3 1 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	98.196.733.350	98.196.733.349,97	(0,03)	100,00
3 1 2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 1 3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	-	-	-	-
3 1 4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3 1 5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	150.000.000	1.589.781.128,00	1.439.781.128,00	1.059,85
3 1 6	Penerimaan Piutang Daerah	1.916.772.000	318.363.751,00	(1.598.408.249,00)	16,61
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	100.263.505.350	100.104.878.228,97	(158.627.121,03)	99,84
3 2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.261.652.155	761.652.154,88	(500.000.000,12)	60,37
3 2 1	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3 2 2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	500.000.000	-	(500.000.000,00)	-
3 2 3	Pembayaran Pokok Utang	761.652.155	761.652.154,88	(0,12)	100,00
3 2 4	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.261.652.155	761.652.154,88	(500.000.000,12)	60,37
	Pembiayaan Netto	99.001.853.195	99.343.226.074,09	341.372.879,09	100,34
3 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	74.972.670.064,17	74.972.670.064,17	100,00

CATATAN:
SILPA Tahun Anggaran 2010 terdiri dari :
1. SILPA Pemkot tahun anggaran 2010 sebesar Rp. 63.781.565.301,17
2. SISA KAS RSUD tahun 2010 sebesar Rp. 4.269.946.350,00
3. SISA Kas Taman Pintar tahun 2010 sebesar Rp. 6.921.058.413,00
Rp. 74.972.670.064,17

WALIKOTA YOGYAKARTA

H. HERRY ZUDIANTO

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	20	28,878,356,546.00	179,423,640,058.00	88,885,534,230.55	52,062,556,174.99
DAU	20	365,042,000,000.00	592,594,528,000.00	485,947,422,800.00	80,364,857,822.20
BL	20	132,970,368,976.00	447,256,076,181.00	258,338,142,529.60	77,615,281,672.28
BTL	20	293,463,109,280.00	782,307,301,324.00	510,169,659,689.90	133,788,981,370.61
Valid N (listwise)	20				

Hasil output SPSS Alokasi Belanja Langsung

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
BL	2.5834E11	7.76153E10	20
PAD	8.8886E10	5.20626E10	20
DAU	4.8595E11	8.03649E10	20

Correlations

		BL	PAD	DAU
Pearson Correlation	BL	1.000	.610	.488
	PAD	.610	1.000	.132
	DAU	.488	.132	1.000
Sig. (1-tailed)	BL	.	.002	.015
	PAD	.002	.	.290
	DAU	.015	.290	.
N	BL	20	20	20
	PAD	20	20	20
	DAU	20	20	20

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PAD ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.736 ^a	.541	.487	5.55708E10

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BL

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6.196E22	2	3.098E22	10.032	.001 ^a
	Residual	5.250E22	17	3.088E21		
	Total	1.145E23	19			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BL

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-9.849E9	7.896E10		-.125	.902
	PAD	.829	.247	.556	3.354	.004
	DAU	.400	.160	.415	2.502	.023

a. Dependent Variable: BL

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.983	1.018
	DAU	.983	1.018

a. Dependent Variable: BL

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on			Variance Proportions		
		Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	PAD	DAU
1	1	2.817	1.000	.00	.03	.00
	2	.170	4.065	.02	.97	.02
	3	.013	14.868	.97	.00	.97

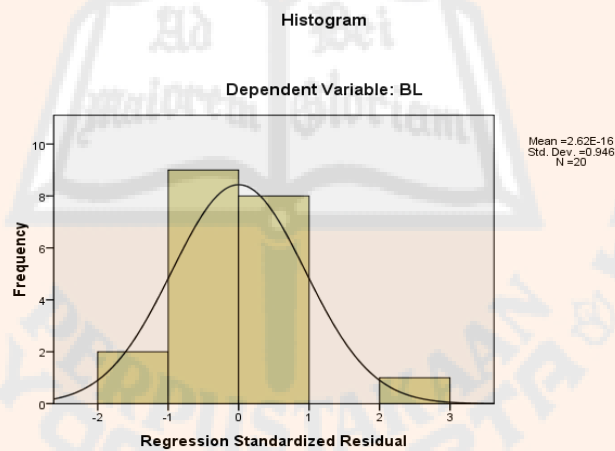
a. Dependent Variable: BL

Residuals Statistics^a

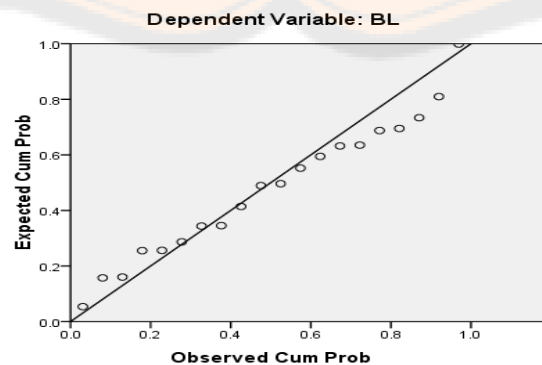
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	1.7219E11	3.5577E11	2.5834E11	5.71059E10	20
Std. Predicted Value	-1.509	1.706	.000	1.000	20
Standard Error of Predicted Value	1.630E10	3.082E10	2.123E10	3.619E9	20
Adjusted Predicted Value	1.6608E11	3.5887E11	2.5765E11	5.80071E10	20
Residual	-8.94444E10	1.65810E11	.00001	5.25647E10	20
Std. Residual	-1.610	2.984	.000	.946	20
Stud. Residual	-1.705	3.221	.006	1.016	20
Deleted Residual	-1.00309E11	1.93214E11	6.93113E8	6.06681E10	20
Stud. Deleted Residual	-1.816	5.005	.089	1.346	20
Mahal. Distance	.686	4.892	1.900	1.021	20
Cook's Distance	.000	.572	.051	.126	20
Centered Leverage Value	.036	.257	.100	.054	20

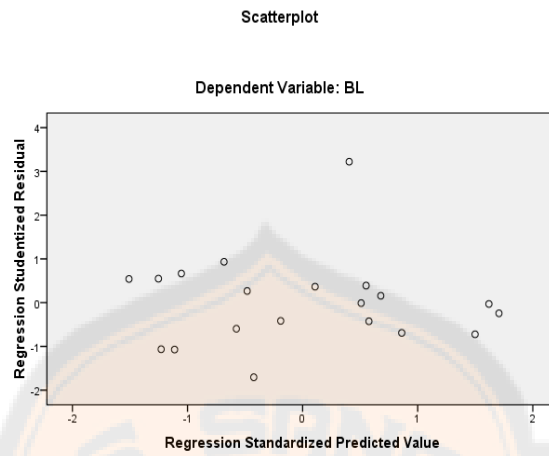
a. Dependent Variable: BL

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual





One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	20
	Mean	.0000115
	Std. Deviation	5.25646711E10
Most Extreme Differences	Absolute	.155
	Positive	.155
	Negative	-.094
	Kolmogorov-Smirnov Z	.693
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.724

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-9.94342E8
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	8
Z	-1.149
Asymp. Sig. (2-tailed)	.251

a. Median

Hasil output SPSS Regresi Alokasi Belanja Tidak Langsung

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
BTL	5.1017E11	1.33789E11	20
PAD	8.8886E10	5.20626E10	20
DAU	4.8595E11	8.03649E10	20

Correlations

		BTL	PAD	DAU
Pearson Correlation	BTL	1.000	.414	.781
	PAD	.414	1.000	.132
	DAU	.781	.132	1.000
Sig. (1-tailed)	BTL	.	.035	.000
	PAD	.035	.	.290
	DAU	.000	.290	.
N	BTL	20	20	20
	PAD	20	20	20
	DAU	20	20	20

Variables Entered/Removed

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	DAU, PAD ^a		Enter

a. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.842 ^a	.709	.674	7.63493E10

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BTL

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2.410E23	2	1.205E23	20.671	.000 ^a
	Residual	9.910E22	17	5.829E21		
	Total	3.401E23	19			

a. Predictors: (Constant), DAU, PAD

b. Dependent Variable: BTL

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.602E11	1.085E11		-1.477	.158
	PAD	.815	.339	.317	2.401	.028
	DAU	1.231	.220	.739	5.597	.000

a. Dependent Variable: BTL

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.983	1.018
	DAU	.983	1.018

a. Dependent Variable: BTL

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on			Variance Proportions		
		Eigenvalue	Condition Index	(Constant)	PAD	DAU
1	1	2.817	1.000	.00	.03	.00
	2	.170	4.065	.02	.97	.02
	3	.013	14.868	.97	.00	.97

a. Dependent Variable: BTL

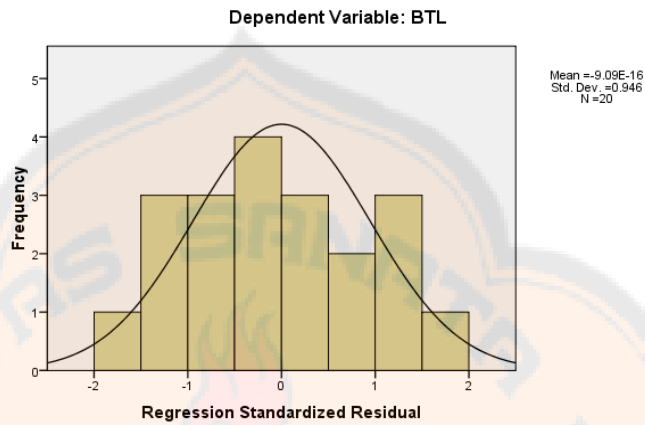
Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	3.3240E11	6.9127E11	5.1017E11	1.12623E11	20
Std. Predicted Value	-1.578	1.608	.000	1.000	20
Standard Error of Predicted Value	2.240E10	4.234E10	2.917E10	4.973E9	20
Adjusted Predicted Value	3.4116E11	7.0194E11	5.0938E11	1.12837E11	20
Residual	-1.25204E11	1.16482E11	-.00007	7.22192E10	20
Std. Residual	-1.640	1.526	.000	.946	20
Stud. Residual	-1.720	1.694	.005	1.020	20
Deleted Residual	-1.37721E11	1.43631E11	7.90450E8	8.41897E10	20
Stud. Deleted Residual	-1.836	1.803	.012	1.053	20
Mahal. Distance	.686	4.892	1.900	1.021	20
Cook's Distance	.000	.223	.055	.059	20
Centered Leverage Value	.036	.257	.100	.054	20

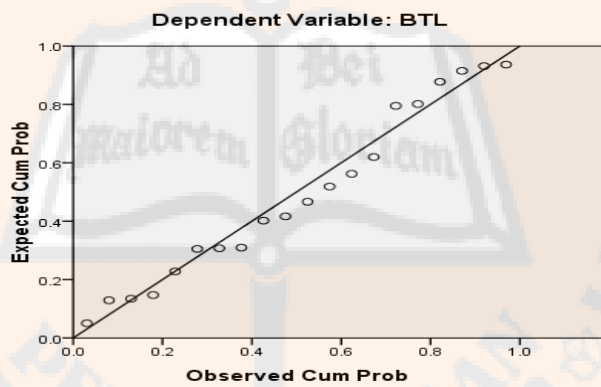
a. Dependent Variable: BTL

Charts

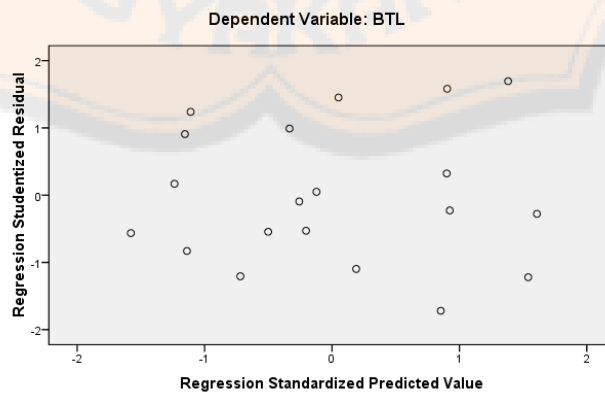
Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	N	20
	Mean	-.0000332
	Std. Deviation	7.07665594E10
Most Extreme Differences	Absolute	.118
	Positive	.118
	Negative	-.083
	Kolmogorov-Smirnov Z	.528
	Asymp. Sig. (2-tailed)	.943

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-9.81182E9
Cases < Test Value	10
Cases >= Test Value	10
Total Cases	20
Number of Runs	10
Z	-.230
Asymp. Sig. (2-tailed)	.818

a. Median